

Bab VII Bukittinggi pada Masa Pascakolonial (Tahun 1945-2016)

Perkembangan Bukittinggi pada masa pascakolonial (tahun 1945-2016) banyak digali dari dokumen, arsip, buku-buku sejarah, peraturan dan keputusan pemerintah, serta peta-peta dari NEFIS (*Netherlands Force and Intelligence Service*), direktorat *landuse*, direktorat tata guna tanah, BIG (Badan Informasi Geospasial), *google earth*, dan *bing map satelite*. Pendekatan hermeneutik masih digunakan untuk menggali sejarah perkembangan kota.

VII.1 Perkembangan Kota Bukittinggi

Kondisi keamanan di Indonesia yang belum stabil setelah kemerdekaan menyebabkan pembangunan belum bisa dilakukan secara optimal. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan kondisi keamanan berlangsung cukup lama, mulai dari masuknya pasukan sekutu hingga pemberontakan dari masyarakat sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada pembangunan dan perkembangan kota, termasuk di Bukittinggi.

Berakhirnya pendudukan Jepang meninggalkan masalah ekonomi yang serius di Bukittinggi. Kemiskinan, kekurangan makanan dan pakaian masih dirasakan masyarakat. Krisis ekonomi memicu masyarakat menjarah gudang-gudang cadangan makanan Jepang di sekitar Bukittinggi pada tahun 1946. Awal tahun 1947 kebutuhan sandang di Bukittinggi sudah terpenuhi sedangkan daerah bagian Selatan dan daerah terpencil lainnya di Sumatra Barat masih mengalami kekurangan (Laporan NEFIS: Sumatra's Weskust: Signalement Sumatra No. 66, 12 April 1946 (Proc. Gen. 824) dalam Kahin, 2005, pp. 193–205). Kebutuhan pangan masyarakat mulai terpenuhi, tahun 1948 panen padi di Bukittinggi mencapai 2.895 ton dengan luas sawah sekitar 767 ha. Aturan bertanam padi masyarakat Kurai mengikuti plakat bertanam padi yang dikeluarkan pejabat pertanian (Hadjerat, 1950, p. 21; Kahin, 1997, p. 195). Walaupun kondisi ekonomi mulai membaik namun kegiatan pasar belum berjalan normal, demikian juga fungsi lain yang diemban Bukittinggi.

Dalam rentang waktu 1945-2016 wilayah administrasi Kota Bukittinggi mengalami tiga kali perubahan, yakni tahun 1945, 1980, dan tahun 1999. Dari tiga kali perubahan tersebut, terjadi perluasan kota di tahun 1999 yang semakin memperkuat peranan budaya dalam perkembangan Kota Bukittinggi. Berikut perkembangan kotanya dari masa ke masa.

1. Awal kemerdekaan tahun 1945, luas Bukittinggi masih merujuk pada luas yang ditetapkan Pemerintah Jepang, yakni sekitar 9.304,05 ha (Shi Yaku Sho/ Bukittinggi Baru). Permasalahan batas wilayah muncul setelah keluarnya Maklumat Residen Sumatra Barat tanggal 21 Mei 1946 No. 20/46 tentang penetapan luas dan batas nagari yang berpedoman pada kondisi aktual 17 Agustus 1945; serta Maklumat Residen Sumatra Barat No. 21/46 tentang penetapan pemimpin dalam setiap nagari yang terdiri dari Wali Nagari (W.N.), Dewan Harian Nagari (D.H.N.), serta Dewan Perwakilan Nagari (D.P.N.). Bukittinggi sempat menjalankan maklumat No. 21/46.

Wali Nagari Mandiangin mengingatkan kepada Residen Sumatra Barat melalui surat tertanggal 29 Oktober 1946 No. 79, bahwa maklumat tersebut tidak berlaku pada lima nagari di Kurai karena statusnya pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Kota Bukittinggi Baru /Shi Yaku Sho bersama dengan 11 nagari lainnya. Sebagai tindak lanjutnya, keenam belas nagari tersebut diberi hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya. Wali-wali nagari dalam Kota Bukittinggi Baru menjadi pegawai pemerintah kota. Dewan Perwakilan Nagari dihapuskan dan segera dibentuk Dewan Perwakilan Kota. Saat itu Pemerintah Kota Bukittinggi belum mengambil keputusan mengenai nagari yang menjadi kota, apakah enam belas nagari atau hanya lima Nagari Kurai (Hadjerat, 1947, p. 32, 1950, p. 7).

Tanggal 4-6 Januari 1947 dalam rapat pleno KNI (Komite Nasional Indonesia) Sumatra Barat di Bukittinggi, dibahas tiga alternatif batas wilayah Kota Bukittinggi, yakni: 1) berdasarkan batas *Stadsgemeente* Fort de Kock; 2) berdasarkan batas Nagari Kurai V Jorong; 3) berdasarkan batas Shi Yaku Sho

(16 nagari). Dalam rapat pleno tersebut beberapa nagari tidak mau bergabung menjadi kota, sehingga batas sementara Kota Bukittinggi merujuk pada batas *Stadseemeente* Fort de Kock. Tanggal 22 Maret 1947 terbentuk daerah otonomi Kurai Limo Jorong.¹ Otonomi ini ditujukan untuk menentukan masuk tidaknya wilayah Nagari Kurai V Jorong ke dalam Kota Bukittinggi dengan syarat yang diajukan. Syarat tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan warga Nagari Kurai beserta keturunannya di masa yang akan datang, jika batas Kota Bukittinggi mengikuti batas Nagari Kurai.

Konflik batas wilayah otonom Nagari Kurai V Jorong dengan Kota Bukittinggi berakhir dengan perundingan tanggal 27-28 Mei 1947 antara Dewan Perwakilan Nagari Kurai V Jorong dengan Pemerintah Kota Bukittinggi atas anjuran Gubernur Sumatra. Tanggal 29 Mei 1947 disepakati ‘Naskah Kayu Kubu’ yang menyatakan batas Kota Bukittinggi mengikuti batas otonomi Nagari Kurai V Jorong. Tanggal 09 Juni 1947 melalui surat keputusan Gubernur Sumatra No. 391, Naskah Kayu Kubu disahkan sekaligus ditetapkannya Kota Bukittinggi sebagai daerah otonom di Sumatra Barat (*Hadjerat, 1947, pp. 29–37; Kahin, 2005, pp. 193–197*). Isi lengkap naskah Kayu Kubu dapat dilihat pada lampiran H.

2. Tahun 1980 terjadi penggabungan lima wilayah *jorong* di Bukittinggi menjadi tiga kecamatan berdasarkan PP No. 40 Tahun 1980. Penggabungan ini merujuk pada UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah dan adanya UU No. 5 Tahun 1979 tentang desa. Daerah-daerah di dalam *jorong* berupa *koto* (setingkat desa) diganti istilahnya dengan kelurahan. Istilah Kotapraja berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Penggabungan kelima *jorong* meliputi:

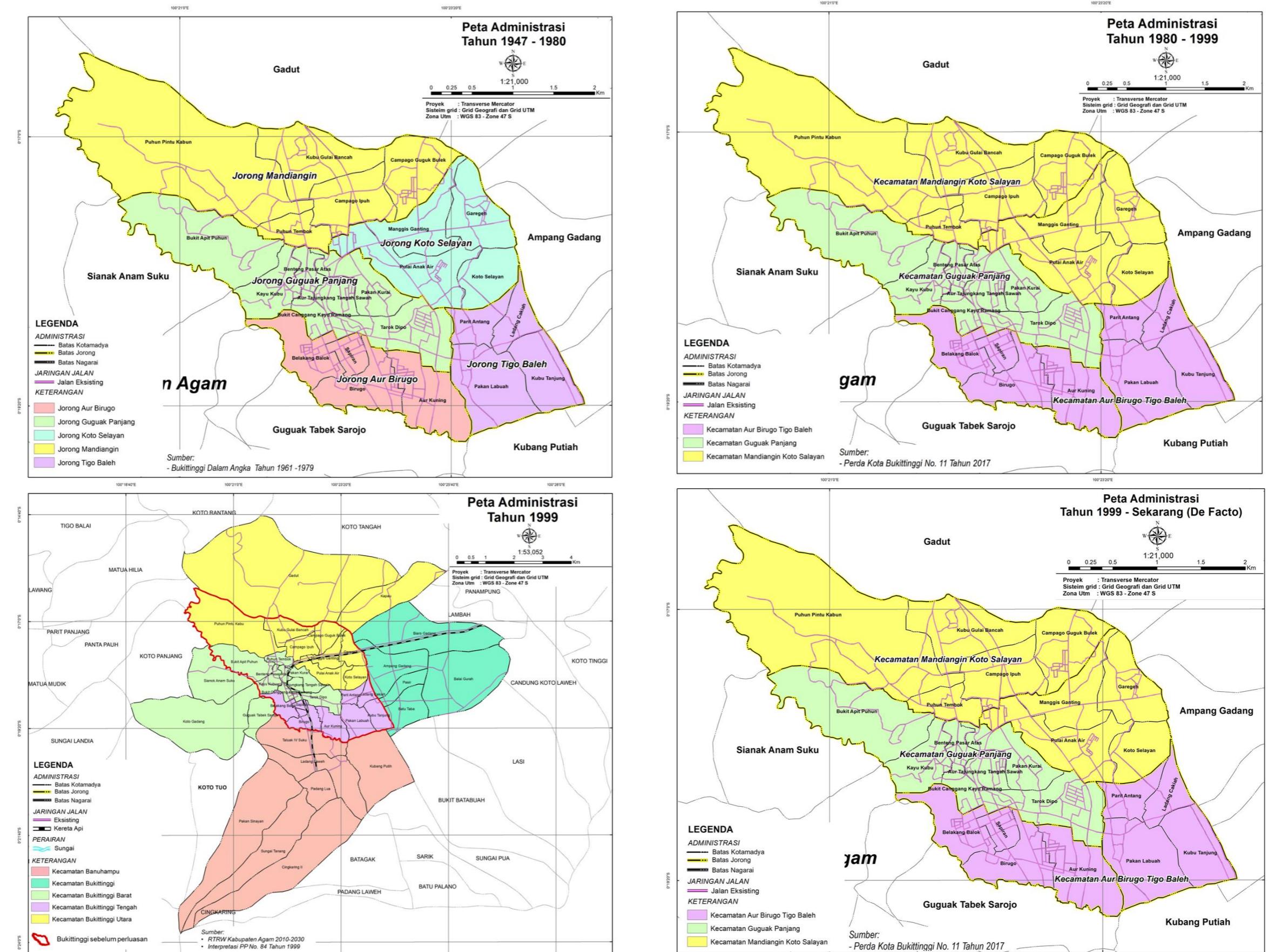
¹ Pembentukan daerah otonom ini merujuk hasil konferensi semua wali nagari di Bukittinggi tanggal 29-30 Maret 1947. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan bahwa pembentukan nagari besar otonom diberlakukan pada semua wilayah di Sumatra Barat dengan menggabungkan beberapa nagari yang berdekatan menjadi satu. Hasilnya, pada November 1948 seratus nagari model lama berhasil bergabung membentuk 21 nagari besar otonom (Husein et al., 1991, p. 610).

- *Jorong* Guguk Panjang menjadi Kecamatan Guguk Panjang
 - *Jorong* Mandiangin dan Koto Salayan bergabung membentuk Kecamatan Mandiangin Koto Salayan
 - *Jorong* Aur Birugo dan Tigo Baleh bergabung membentuk Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
3. Tahun 1999 Kota Bukittinggi diperluas hingga 14.529,90 Ha (145,299 Km²) melalui PP No. 84 Tahun 1999. Perluasan kota meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banuhampu, IV Koto, Tilatang Kamang, dan IV Angkek dengan total 34 (tiga puluh empat) desa di Kabupaten Agam. Pertumbuhan kota tahun 1980–1990-an yang relatif lebih cepat menjadi alasan dilakukannya perluasan kota. Perluasan ini ditolak masyarakat Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi (Masyarakat Kurai).² Penolakan masyarakat Kabupaten Agam dirangkum ke dalam tiga alasan. Pertama, karena masyarakat dan ninik mamak (pemimpin adat) tidak diajak berkonsultasi selama penyusunannya sehingga peraturan tersebut dianggap batal secara hukum.³ Kedua, wilayah perluasan Kota Bukittinggi merupakan wilayah penyumbang PAD terbesar bagi Kabupaten Agam. Ketiga, urbanisasi dan modernisasi dikhawatirkan akan mengikis nilai-nilai budaya masyarakat (Darwin et al., 2019, pp. 533–555).

Jika ditilik dari Naskah Kayu Kubu, penolakan perluasan kota oleh Masyarakat Kurai sebagai penduduk asli Bukittinggi adalah wajar. Konsep tanah ulayat sebagai *land banking* bagi anak cucu Masyarakat Kurai dijaga dengan baik agar masyarakat tidak terusir dari tanahnya sendiri. Demikian juga dengan konsep batas nagari (*adat nan salingka nagari, nagari nan salingka aua*), sehingga perluasan Kota Bukittinggi tidak pernah berhasil. PP No. 84 Tahun 1999 hingga saat ini belum dicabut dan wilayah administrasi Kota Bukittinggi masih menggunakan luas 25,24 Km². Perkembangan wilayah administrasi Bukittinggi setelah kemerdekaan dapat dilihat pada gambar VII.1

² Dalam PP No. 84 Tahun 1999 dijelaskan daya dukung Kota Bukittinggi untuk pembangunan hanya 1.132,39 ha (44,86% dari total luas Kota Bukittinggi [25,24 Km²])

³ Suara pemimpin tradisional Minangkabau *tungku tigo sajarangan* (*ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai*)



Gambar VII. 1 Perkembangan wilayah administrasi Kota Bukittinggi setelah kemerdekaan dari tahun 1945-2016

Halaman ini sengaja di kosongkan, karena halaman di atasnya memiliki ukuran kertas A3

VII.1.1 Tanah Ulayat

Pelepasan tanah ulayat untuk pembangunan mengalami proses yang panjang, dari fase yang sangat sulit (menghambat pembangunan) hingga ke fase penyadaran⁴ lebih mudah pelepasannya (kontrol pembangunan). Pendekatan kepada pemilik dan ninik mamak serta besaran kompensasi menjadi indikator keberhasilan pelepasan tanah ulayat. Karakter masyarakat *Luhak Agam* yang *buminyo hangek, aianyo karuah, ikannya lia* (masyarakatnya berwatak keras, heterogen, persaingan hidup tajam) diduga melatarbelakangi sulitnya pelepasan tanah ulayat di Bukittinggi.⁵ Menurut 'Asri (2001, p. 131) pelepasan tanah ulayat di Bukittinggi relatif lebih sulit dibandingkan kota lainnya di Sumatra Barat. Konsep batas *adat nan salingka nagari, nagari nan salingka aua* yang mengakar kuat di masyarakat Kurai dan menjadi dasar pertimbangan pelepasan tanah ulayat. Konflik atas tanah ulayat tidak jarang menyebabkan terjadinya pelepasan tanah ulayat. Fenomena tanah ulayat ini dapat dilihat pada penjelasan berikut.

VII.1.1.1 Pelepasan Tanah Ulayat Tahun 1945-1960

Tahun 1945-1960 merupakan masa-masa sulit pelepasan tanah ulayat untuk pembangunan di Bukittinggi. Keluarnya Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintahan Jepang, membuat rasa memiliki terhadap tanah ulayat semakin kuat. Tanah yang dibeli dan dikuasai Belanda/ Jepang otomatis menjadi milik negara, seperti tanah kodim dan penjara. Namun tanah yang dipinjam Belanda kepada ninik mamak Nagari Kurai (kemudian dikuasai Jepang) kembali menjadi tanah ulayat nagari, tidak dikuasai negara. Seperti tanah di Pasar Atas⁶ dan stasiun kereta api. Tanah-tanah ulayat yang dijual dan dipinjamkan sebagian besar berada di Jorong

⁴ Fase penyadaran yang dimaksud adalah fase/ tahap dimana masyarakat mulai menyadari pembangunan kota membutuhkan lahan dan masyarakat mau melepaskan tanah ulayatnya untuk pembangunan dengan kompensasi yang disepakati bersama. Tidak jarang masyarakat yang mewakafkan tanah ulayatnya untuk pembangunan.

⁵ Tanah sebagai asset pembangunan dan cadangan lahan kedepan bagi anak cucu terpatri kuat dalam Masyarakat Kurai

⁶ Tanah Pasar Atas kemudian diakuisisi menjadi milik pemerintah Kota Bukittinggi melalui Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 21 tahun 2018. Kasus ini diangkat masyarakat ke kementerian ATR dan surat terbuka dilayangkan ke Presiden Jokowi (Reza, 2019; Riyadi, 2019).

Guguk Panjang dan Aur Birugo (Kawasan Perkotaan Bukittinggi), dan sebagian kecil berada di Jorong Mandiangin, seperti kuburan Belanda.

Di tengah-tengah situasi keamanan yang belum kondusif dan masalah pengembalian tanah ulayat, Walikota Bukittinggi Nauman Djamil Dt. Mangkuto Ameh (1952-1957) berhasil melakukan pengadaan tanah (pelepasan tanah ulayat) untuk pembangunan. Keberhasilan Walikota Nauman tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai penduduk asli Kurai dan kompensasi yang berikan kepada pemilik tanah. Tanah yang dibeli terletak di Jorong Guguak Panjang (Belakang RSUD dan di Jl. Angku Basa) serta di Jorong Mandiangin (di Bukit Pauh dan Gulai Bancah). Tanah tersebut diperuntukan sebagai lahan perumahan dinas pegawai dan gedung pemerintah ('Asri, 2001, pp. 98-99). Gedung balaikota yang awalnya berada di Jl. Perwira (Belakang Balok), tahun 2005 dipindahkan ke Jl. Kusuma Bhakti (Gulai Bancah) dengan dengan *view* Kota Bukittinggi dari ketinggian 939 mdpl (Google Earth, 2020; Putri, 2019).

Tahun 1957 Bukittinggi menjadi ibukota Provinsi Sumatra Barat melalui UU Darurat No. 19 Tahun 1957. Pada tahun yang sama ibukota Provinsi Sumatra Barat dipindahkan secara *de facto* ke Padang.⁷ Salah satu pemicu pindahnya ibukota Provinsi Sumatra Barat dari Bukittinggi ke Padang adalah sulitnya pelepasan tanah ulayat oleh masyarakat.⁸ Pertimbangan lainnya karena morfologi Padang yang datar, dan keberadaan lokasi pelabuhan udara serta pelabuhan laut di Padang (Safwan et al., 1987, p. 95). Fakultas Kedokteran serta Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam (FIPIA) yang berdiri pada tanggal 07 September 1955 di Bukittinggi dan diresmikan oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta (lihat gambar VII.2), pada tahun 1961 dan 1962 dipindahkan ke Padang dengan alasan yang sama, yakni masalah ketersediaan lahan untuk pengembangan kampus. Peresmian Fakultas kedokteran menggunakan gedung bekas *kweekschool* yang

⁷ Pemindahan ibukota Provinsi Sumatra Barat secara *de jure* terjadi melalui ketetapan PP No. 29 Tahun 1979.

⁸ Bukittinggi sebagai salah satu wilayah inti Minangkabau (*luhak nan tigo*) memegang kuat budaya matrilineal (dalam hal ini tanah ulayat), sedangkan Padang merupakan wilayah rantau yang sudah banyak pendatang. Kepemilikan tanah ulayat di Padang tidak sekuat di Bukittinggi

menjadi gedung sekolah Menengah Atas pada saat itu (MDSP, 2018; UNAND, 2019).



Gambar VII.2 Peresmian Fakultas Kedokteran Unand tahun 1955 di Bukittinggi
(MDSP, 2018; UNAND, 2019)

VII.1.1.2 Pelepasan Tanah Ulayat Tahun 1961-1990

Pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra Barat yang terjadi tahun 1958-1961 sebagai bentuk protes terjadinya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah serta tuntutan otonomi, membuat dana pembangunan Kota Bukittinggi sulit didapatkan (Asnan, 2006, p. 176; Suryadi, 2015). Semasa jabatan Walikota Bukittinggi Anwar Maksum Marah Sutan (1960-1966), dana pembangunan dan kehidupan ekonomi masyarakat sangat susah, sehingga catatan perkembangan Kota Bukittinggi pada era ini tidak ditemukan. Pada masa jabatan Walikota A. Kamal (1968-1976) pembangunan Bukittinggi mulai terlihat di bidang ekonomi dan infrastuktur. Pasar Atas yang menjadi sentral kegiatan ekonomi masyarakat Bukittinggi dan Luhak Agam tahun 1972 terbakar. Pasar Atas dibangun kembali dan diresmikan Presiden Soeharto tahun 1975. Pembangunan pasar atas tahap II dilanjutkan oleh Walikota Masri (1976-1978). Berkembangnya pasar Bukittinggi sebagai sentra perdagangan lingkup regional dan semakin banyaknya kendaraan antar kota – antar provinsi yang melintasi Kota Bukittinggi menyebabkan masalah kesemrawutan, kemacetan, dan masalah parkir diakhir tahun 1970-an. Tanah-tanah banyak yang kosong, namun sangat sulit untuk didapatkan ('Asri, 2001, p. 113).

Pada masa jabatan Walikota Oemar Ghaffar (1978-1983) masalah kesemrawutan Kota Bukittinggi mulai terurai. Perkembangan kota diarahkan ke timur dengan membangun terminal dan pasar Inpres Aur Kuning tahun 1978-1979. Pembangunan dilakukan di atas tanah bekas peninggalan Jepang seluas empat hektar. Upaya untuk menghidupkan pasar dilakukan pemerintah dengan membangun pertokoan yang menjual hasil konveksi. Masyarakat yang tanahnya terkena dampak diberikan kompensasi berupa pemberian toko ('Asri, 2001, pp. 113–121).⁹ Pasar Aur Kuning kemudian berkembang menjadi pasar konveksi (pusat grosir) dalam lingkup Sumatra Tengah yang dikenal dengan Tanah Abang kedua.

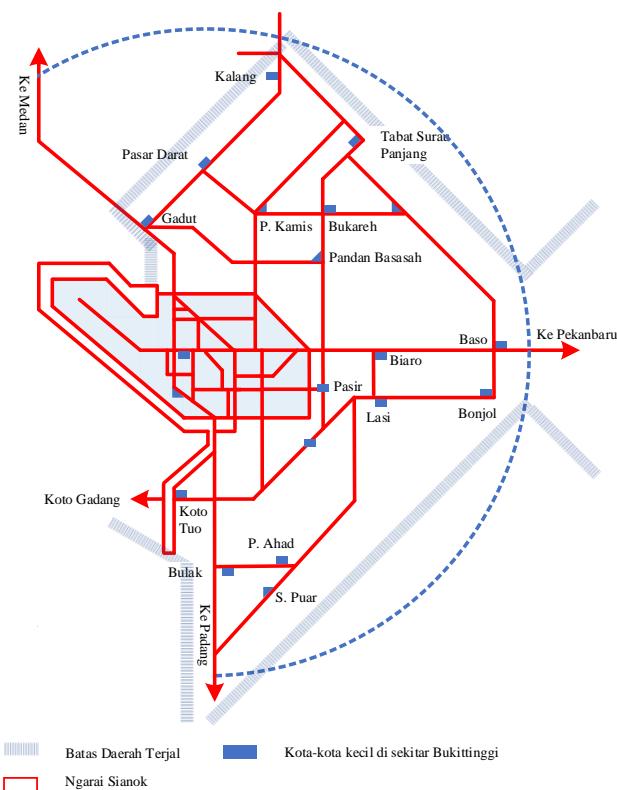
Tahun 1983 Walikota Oemar Ghaffar mewacanakan perluasan Kota Bukittinggi dengan memasukan beberapa wilayah Kabupaten Agam ke Bukittinggi. Wacana perluasan kota ini dilatarbelakangi pesatnya pertumbuhan penduduk dengan kepadatan penduduk yang mencapai 29 jiwa/ha dan beban pembangunan kota (Yulis, 2011, p. 1). Arahan pengembangan Kota Bukittinggi kemudian dituangkan ke dalam Rencana Induk Kota Bukittinggi Tahun 1984-2004. Wilayah perluasannya mencapai radius \pm 10 km meliputi Wilayah Gadut, Kapau, Pakan Kamis, Biaro, Baso, Lasi, Sei Puar, Sei Tanang, Koto Tuo. Wilayah tersebut akan dikembangkan sebagai sub pusat kegiatan ekonomi (Pemkot DT II Bukittinggi, 1985, pp. 11–13). Rencana ini secara fisik tidak berhasil diundangkan, namun pengaruh pembangunan Bukittinggi dapat dirasakan hingga ke wilayah-wilayah tersebut (lihat gambar VII.3).

VII.1.1.3 Pelepasan Tanah Ulayat Tahun 1991-2016

Pembangunan wilayah dan kota di Sumatra Barat tidak lepas dari masalah tanah ulayat. Tanah ulayat rajo dan nagari lebih mudah dilepaskan untuk pembangunan daripada tanah ulayat kaum dan suku (Dewi et al., 2020, p. 281). Pelepasan tanah ulayat di Bukittinggi untuk pembangunan pada era tahun 1990-an diwarnai dengan masalah ketidaksesuaian komitmen pemerintah dengan pelaksanaan di lapangan

⁹ Wawancara Zul'Asri dengan mantan Walikota Bukittinggi Oemar Gaffar pada tanggal 18 Agustus 1998 ('Asri, 2001, p. 121)

(terkait masalah kompensasi konsolidasi lahan Jalan Bypass).¹⁰ Komitmen awal pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan Jl. Bypass adalah pelepasan 15% hak atas tanah untuk disumbangkan tanpa ganti rugi dengan kompensasi lingkungan tertata rapi, semua tanah menghadap ke jalan, terdapatnya fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta memperoleh sertifikat tanah secara gratis. Kenyataannya pemotongan tanah melebihi kesepakatan ($> 15\%$), lokasi tanah berpindah jauh dari letak tanah asal, dan tidak semua mendapatkan sertifikat (Nur et al., 2020, pp. 43–48). Penyelesaian masalah konsolidasi lahan Jl. Bypass hingga tahun 2019 masih terus diupayakan pemerintah, dengan mengeluarkan sembilan sertifikat. Tercatat 139 bidang tanah di Jl. Bypass proses sertifikatnya belum selesai (Yulman, 2019).



Gambar VII.3 Arah pengembangan tata ruang Kota Bukittinggi radius ± 10 Km
(digambar ulang dari Pemkot DT II Bukittinggi, 1985, p. 13)

¹⁰ Rencana konsolidasi lahan Bypass sudah tercantum pada Rencana Induk Kota Bukittinggi Tahun 1984-2004 (Pemkot DT II Bukittinggi, 1985, p. 14).

Pelepasan tanah ulayat menjadi milik pribadi maupun untuk pembangunan kota banyak terjadi di Kecamatan Guguak Panjang, Aur Birugo, Mandiangin, Koto Salayan, dan di Tigo Baleh. Pelepasan ini diidentifikasi melalui data pembuatan sertifikat hak milik. Keluarnya wacana perluasan kota tahun 1983 dan PP perluasan kota tahun 1999, membuat angka pembuatan sertifikat meningkat tajam (lihat tabel VII.1, gambar VII.4, dan sub bab VII.3). Isu perluasan kota sudah dimulai tahun 1982 dan diwacanakan walikota tahun 1983. Tahun 1984 wacana tersebut dituangkan ke dalam RIK Bukittinggi. Pelepasan tanah ulayat dan pembuatan sertifikat hak milik mulai tinggi sejak adanya isu dan wacana perluasan tanah, kemudian turun drastis di tahun 1985. Demikian juga setelah keluarnya PP No. 84 tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi. Pelepasan tanah ulayat meningkat dari tahun 2000 dan menurun drastis setelah tahun 2011. Kebutuhan lahan untuk pembangunan, tarik menarik tanah ulayat sebagai cadangan lahan bagi anak cucu masyarakat Kurai, dan nilai ekonomi lahan yang semakin tinggi menjadi dasar dilakukannya perluasan kota.

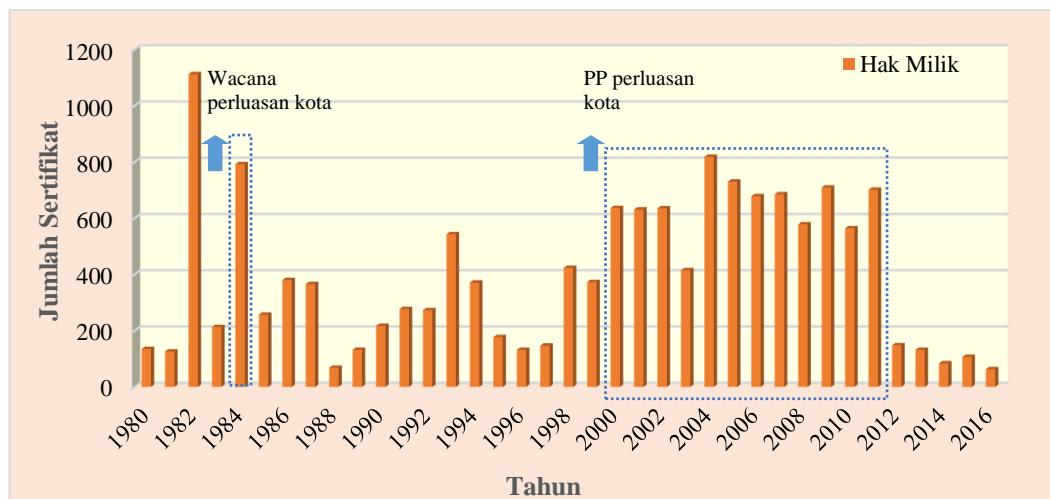
Tabel VII.1 Data pembuatan sertifikat hak milik tanah di Bukittinggi tahun 1980 - 2016

No.	Tahun	Jumlah
1	1980	135
2	1981	126
3	1982	1.112
4	1983	213
5	1984	792
6	1985	257
7	1986	380
8	1987	366
9	1988	68
10	1989	132
11	1990	217
12	1991	277
13	1992	273

No.	Tahun	Jumlah
14	1993	543
15	1994	371
16	1995	177
17	1996	132
18	1997	147
19	1998	423
20	1999	373
21	2000	636
22	2001	631
23	2002	635
24	2003	415
25	2004	818

No.	Tahun	Jumlah
26	2005	730
27	2006	678
28	2007	685
29	2008	578
30	2009	709
31	2010	564
32	2011	701
33	2012	148
34	2013	132
35	2014	84
36	2015	107
37	2016	63

(BPS Kota Bukittinggi, 2000, 2003, 2007, 2017; BPS Kotamadya Bukittinggi, 1984, 1989, 1992, 1996)



Gambar VII.4 Grafik jumlah pembuatan sertifikat tanah hak milik di Kota Bukittinggi tahun 1980-2016

VII.1.2 Penduduk dan Budaya Merantau

Satu-satunya sumber data jumlah penduduk Bukittinggi diawal kemerdekaan (akhir Desember 1946) berasal dari Hadjerat (1950, pp. 5–6) yang menjabat sebagai wali Nagari Kurai V Jorong di tahun 1947. Hadjerat menjelaskan data tersebut merupakan jumlah penduduk asli Kurai yang tersebar di luar Kota Bukittinggi (*Stadsgemeente Fort De Kock*), yang berarti penduduk Kurai dan pendatang yang berdiam di Kota Bukittinggi tidak dihitung. Dalam banyak dokumen, data tersebut dinyatakan sebagai jumlah penduduk Kota Bukittinggi. Hal ini harus diluruskan. Jumlah total penduduk Kurai menurut Hadjerat pada tahun 1946 adalah sekitar 25.000 jiwa, dengan sebaran di Kota Bukittinggi sebanyak 4.478 jiwa dan di luar Kota Bukittinggi (wilayah Nagari Kurai V Jorong) sebanyak 20.522 jiwa. Jumlah penduduk pendatang di Kota Bukittinggi diperkirakan sebanyak 9.549 jiwa, sehingga total jumlah penduduk Bukittinggi tahun 1946 diperkirakan mencapai 34.549 jiwa¹¹ (lihat gambar VII.5) Jumlah penduduk pendatang di Kota Bukittinggi dua kali lipat lebih dari penduduk asli. Rantau kota Bukittinggi berasal dari nagari sekitarnya. Selain suku Minangkabau, terdapat penduduk dari suku Jawa, Cina, dan India bermukim di Bukittinggi.

¹¹ Jumlah penduduk pendatang di Kota Bukittinggi dihitung menggunakan metode interpolasi dari data jumlah penduduk pada masa kolonial Belanda.



Keterangan: * Jorong yang tidak masuk wilayah Kota Bukittinggi

Gambar VII.5 Jumlah dan sebaran penduduk Bukittinggi tahun 1946
(Digambarkan dari Hadjerat, 1950, pp. 5–6 dan hasil interpolasi dari penduduk pada masa kolonial Belanda, 2021)

Penduduk Bukittinggi mulai terdata dengan baik sejak sensus pertama Indonesia pada tahun 1961. Data penduduk Bukittinggi tahun 1947-1960 belum ditemukan. Laju pertumbuhan rata-rata penduduk Bukittinggi tahun 1961-2016 mencapai 1,64 % pertahun. Jumlah penduduk menurun secara drastis ditahun 1976, karena Batalyon 132 Bimasakti dipindahkan dari Bukittinggi ke Bangkinang Riau ('Asri, 2001, p. 35).

Sebelum tahun 2003 sebaran penduduk terbesar berada Kecamatan Guguk Panjang (pusat kota), tahun 2004 – 2016 sebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan. Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 Kota Bukittinggi bertransformasi menjadi kota sedang (jumlah penduduk 100.000 – 500.000 jiwa) pada tahun 2004. Dengan daya dukung yang terbatas dan asumsi tidak ada perluasan kota, dipastikan Bukittinggi tidak akan menjadi kota besar dari kategori jumlah penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Bukittinggi tahun 1961-2016 dapat dilihat pada tabel VII.2 dan gambar VII.6.

Pemberontak PRRI tahun 1958-1961 memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Sumatra Barat, termasuk Bukittinggi. Rasa tidak aman mendorong terjadinya eksodus masyarakat Minangkabau besar-besaran ke daerah lain, seperti Jakarta dan Medan (Hamka, 1985, pp. 116–117; Liputan6.com, 2021; Naim, 1984,

pp. 93–94). Eksodus¹² masyarakat pada masa ini merupakan puncak merantau di Minangkabau. Jika diteliti lebih dalam jenis *merantau Cino* yang terjadi. Eksodus masyarakat Bukittinggi ke Medan dipengaruhi jaringan dan fasilitas transportasi yang membaik (lihat gambar VII.7).

Tabel VII.2 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi tahun 1961–2016

No.	Tahun	Jumlah Penduduk per Jorong/ Kecamatan (Jiwa)					Jumlah Penduduk Kota (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		Guguk Panjang	Mandiangin	Koto Selayan	Aur Birugo	Tigo Baleh		
1	1961	29.213	11.281	3.885	4.445	2.632	51.456	
2	1962	29.597	11.549	3.953	4.761	2.659	52.519	2,07%
3	1963	29.979	11.823	4.020	5.098	2.684	53.604	2,07%
4	1964	30.356	12.098	4.089	5.458	2.710	54.711	2,07%
5	1965	30.732	12.377	4.157	5.840	2.735	55.841	2,07%
6	1966	31.100	12.658	4.228	6.248	2.760	56.994	2,06%
7	1967	31.465	12.943	4.295	6.684	2.784	58.171	2,07%
8	1968	31.825	13.230	4.364	7.146	2.807	59.372	2,06%
9	1969	32.178	13.519	4.432	7.639	2.830	60.598	2,06%
10	1970	32.525	13.810	4.500	8.162	2.852	61.849	2,06%
11	1971	32.704	14.021	4.545	8.680	2.860	62.810	1,55%
12	1972	33.546	14.382	4.662	8.903	2.934	64.427	2,57%
13	1973	34.088	14.557	4.851	9.174	2.990	65.660	1,91%
14	1974	34.855	14.887	4.957	9.378	3.057	67.134	2,24%
15	1975	35.578	15.097	5.147	9.570	3.132	68.524	2,07%
16	1976	32.793	15.307	5.119	7.641	3.035	63.895	-6,76%
17	1977	33.479	15.630	5.232	7.803	3.100	65.244	2,11%
18	1978	32.830	15.899	5.565	9.440	3.170	66.904	2,54%
19	1979	33.684	16.157	5.768	9.509	3.381	68.499	2,38%
20	1980	34.395	17.741	5.904	9.276	3.375	70.691	3,20%
21	1981	34.884		23.970		12.897	71.751	1,50%
22	1982	34.948		24.444		12.607	71.999	0,35%
23	1983	35.222		24.754		12.587	72.563	0,78%
24	1984	35.666		25.065		12.745	73.476	1,26%
25	1985	35.999		25.381		12.906	74.286	1,10%
26	1986	33.890		27.236		14.324	75.450	1,57%
27	1987	34.235		27.418		14.567	76.220	1,02%
28	1988	34.462		27.441		14.824	76.727	0,67%
29	1989	34.427		27.469		14.851	76.747	0,03%
30	1990	37.448		29.474		16.889	83.811	9,20%

¹² Eksodus adalah perbuatan meninggalkan tempat asal (kampung halaman, kota, negeri) oleh penduduk secara besar-besaran. Eksodus ini oleh Mochtar Naim disebut puncak merantau orang Minangkabau. Eksodus tidak hanya karena PPRI tapi juga karena adanya gerakan komunis (Naim, 1984, p. 264). Wilayah yang dituju adalah Jakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, dan Lampung (Hamka, 1985, pp. 116–117; Naim, 1984, p. 264).

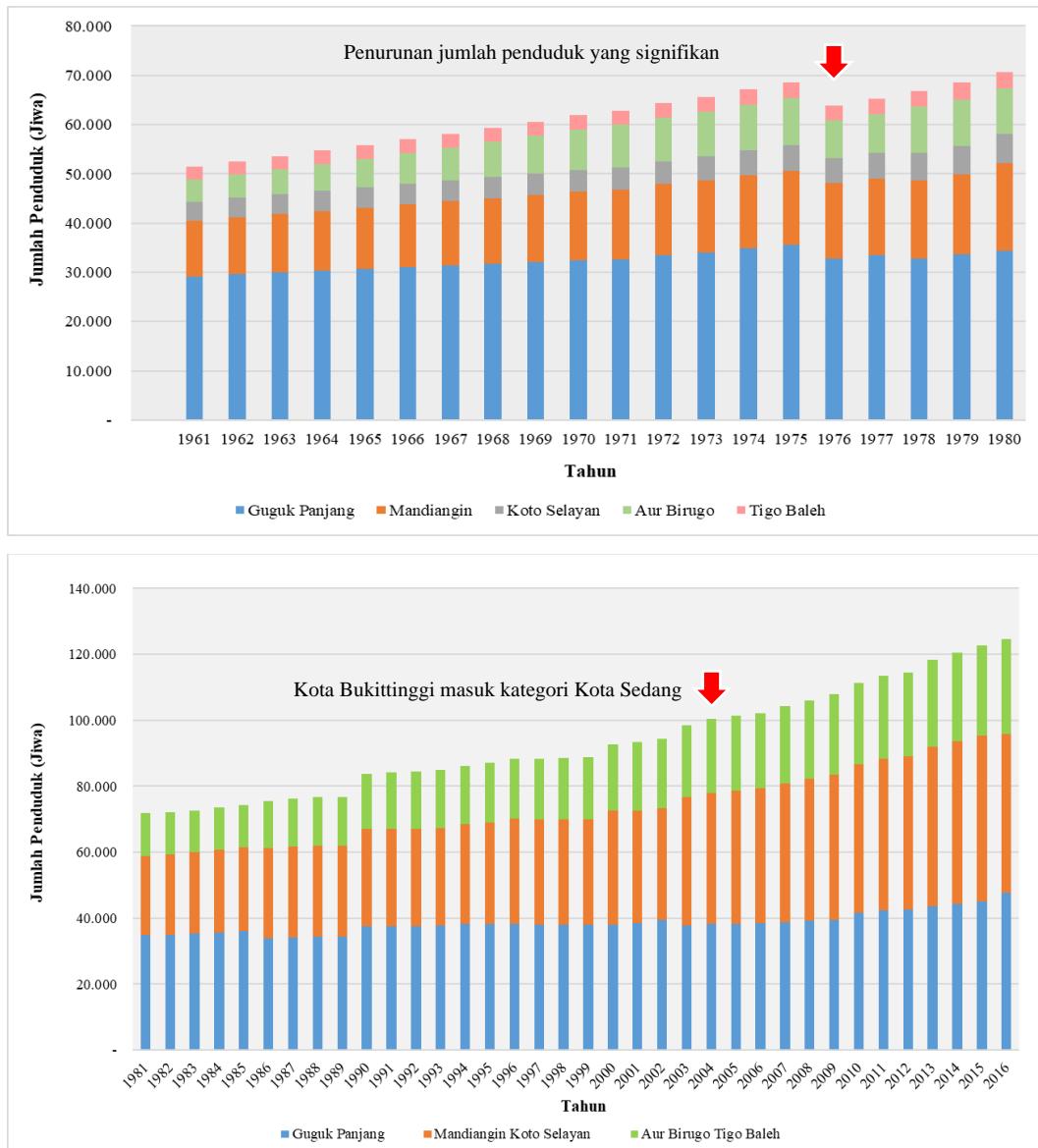
No.	Tahun	Jumlah Penduduk per Jorong/ Kecamatan (Jiwa)					Jumlah Penduduk Kota (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		Guguk Panjang	Mandiangin	Koto Selayan	Aur Birugo	Tigo Baleh		
31	1991	37.545		29.563		17.168	84.276	0,55%
32	1992	37.536		29.574		17.364	84.474	0,23%
33	1993	37.639		29.652		17.643	84.934	0,54%
34	1994	38.228		30.199		17.816	86.243	1,54%
35	1995	38.204		30.839		18.093	87.136	1,04%
36	1996	38.170		31.991		18.255	88.416	1,47%
37	1997	38.058		31.766		18.603	88.428	0,01%
38	1998	38.070		31.941		18.640	88.651	0,25%
39	1999	38.023		31.801		18.869	88.693	0,05%
40	2000	38.108		34.383		20.277	92.768	4,59%
41	2001	38.510		34.039		20.733	93.282	0,55%
42	2002	39.533		33.776		21.041	94.350	1,14%
43	2003	37.784		38.892		21.875	98.551	4,45%
44	2004	38.124		39.875		22.334	100.333	1,81%
45	2005	38.293		40.390		22.593	101.276	0,94%
46	2006	38.464		40.912		22.852	102.228	0,94%
47	2007	38.827		42.040		23.411	104.278	2,01%
48	2008	39.135		43.017		23.893	106.045	1,69%
49	2009	39.439		44.007		24.359	107.805	1,66%
50	2010	41.643		44.928		24.741	111.312	3,25%
51	2011	42.254		46.062		25.253	113.569	2,03%
52	2012	42.627		46.342		25.446	114.415	0,74%
53	2013	43.457		48.461		26.342	118.260	3,36%
54	2014	44.277		49.376		26.838	120.491	1,89%
55	2015	45.061		50.253		27.307	122.621	1,77%
56	2016	47.768		48.068		28.879	124.715	1,71%
Laju pertumbuhan penduduk rata-rata tahun 1961-2016								1,64%

Keterangan:

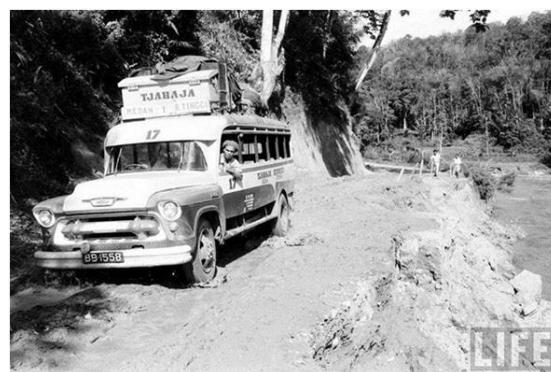
Jorong-jorong yang bergabung menjadi satu kecamatan

(BPS Kota Bukittinggi, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; BPS Kotamadya Bukittinggi, 1980, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997; Kantor Sensus dan Statistik Kotamadya Bukittinggi, 1976, 1977)

Puncak *merantau Cino* terjadi pada masa PRRI. *Merantau Cino* terus berlangsung hingga sekarang dengan alasan yang berbeda, yakni melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik (Abdullah and Budhisantoso, 1983, p. 85). Rantau kota/ urbanisasi ke Bukittinggi terus berlangsung dari nagari sekitarnya. Tahun 2015 tercatat 29,63% rantau kota Bukittinggi berasal dari daerah di Sumatra Barat. Hanya 10,64% dari luar Provinsi. Rantau kota/ urbanisasi sangat mempengaruhi perkembangan kota baik secara fisik, sosial, dan ekonomi (BPS-Statistik Indonesia, 2016, pp. 5–6, 53).



Gambar VII.6 Jumlah dan sebaran penduduk Bukittinggi tahun 1961- 2016



Gambar VII.7 Kendaraan bus jurusan Medan-Bukittinggi tahun 1960-1970
(Suryadi, 2017)

Para rantaunya awalnya mendiami daerah pusat kota (Guguak Panjang dan Aur Birugo) tempat tanah bisa dibeli, kemudian merambat ke Mandiangin dan Koto Salayan. Sebagian besar para rantaunya bergerak di sektor perdagangan dan jasa, baik sebagai pemilik usaha ataupun buruh/ pegawainya. Tahun 2015 tercatat 4.857 migran/ rantaunya bekerja sebagai karyawan/ pegawai/ buruh dan 1.719 membuka usaha sendiri. Persentase penduduk asli Bukittinggi mencapai 59,74%, rantaunya 29,63%, dan 10,64% dari luar Provinsi Sumbar (BPS-Statistik Indonesia, 2016, pp. 5–6, 53). Data migrasi/ rantaunya ke Bukittinggi dapat dilihat pada tabel VII.3 dan gambar VII.8. Sedangkan faktor sentripetal dan centrifugal yang menyebabkan terjadi migrasi di Bukittinggi dapat dilihat pada gambar VII.9.

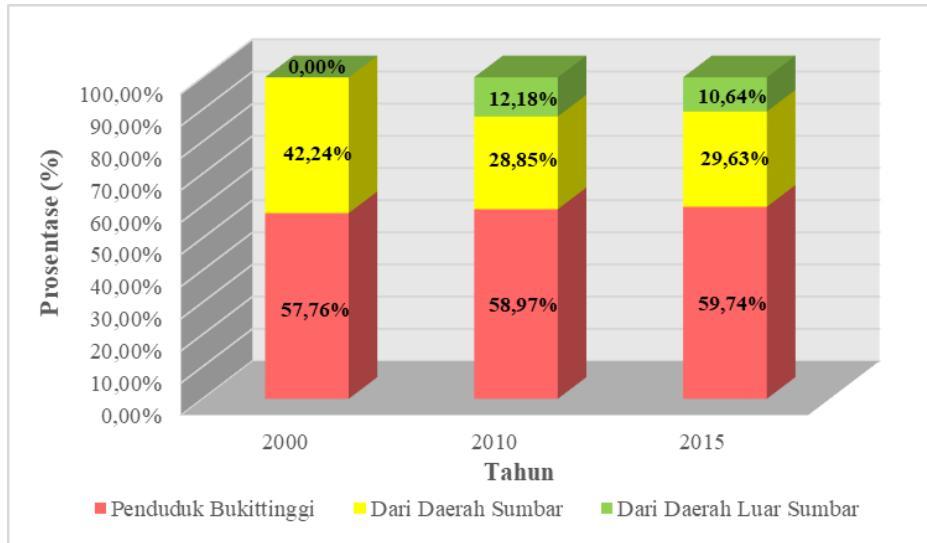
Tabel VII.3 Jumlah migrasi ke Kota Bukittinggi tahun 2000, 2010, dan 2015

No.	Asal	Jumlah Migran (Jiwa)		
		2000	2010	2015
1	Kepulauan Mentawai	65	44	-
2	Pesisir Selatan	286	817	536
3	Solok	457	946	1.069
4	Sijunjung	947	377	347
5	Tanah Datar	1.396	2.420	2.449
6	Padang Pariaman	737	857	1.194
7	Agam	9.755	12.312	17.258
8	Lima Puluh Kota	872	954	806
9	Pasaman	1.681	2.293	3.025
10	Solok Selatan		275	527
11	Dharmas Raya		225	274
12	Pasaman Barat		690	204
13	Kota Padang	18.946	4.065	3.802
14	Kota Solok	1.359	760	804
15	Kota Sawah Lunto	403	324	312
16	Kota Padang Panjang	1.084	997	932
17	Kota Bukittinggi	55.716	65.646	73.117
18	Kota Payakumbuh	2.755	1.938	1.358
19	Kota Pariaman		1.815	1.363
20	Lainnya	0	13.557	13.018
Jumlah		96.459	111.312	122.395

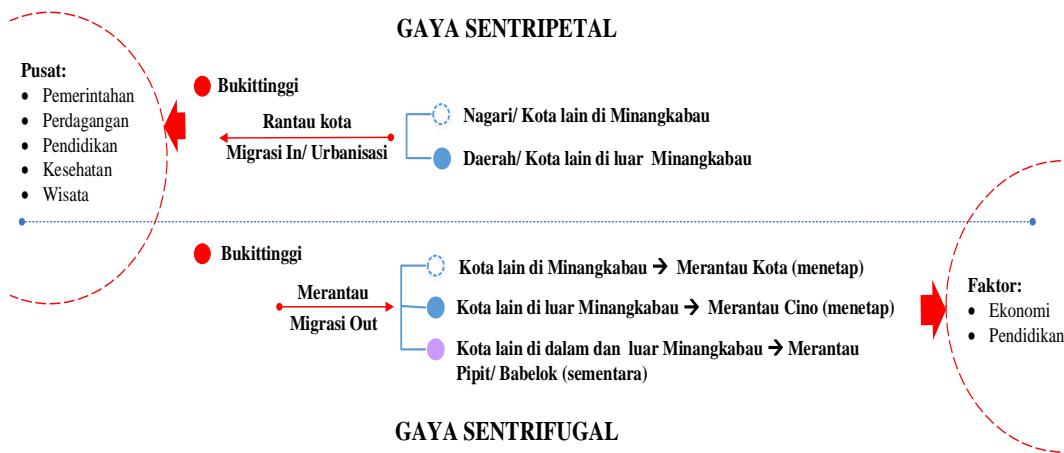
(BPS-Statistik Indonesia, 2012, 2016; Iskarni, 2011)

Keterangan:

Kabupaten/ Kota Baru hasil pemekaran



Gambar VII.8 Komposisi penduduk Bukittinggi berdasarkan data migrasi tahun 2000-2015¹³



Gambar VII.9 Migrasi/ merantau, gaya sentripetal dan sentrifugal penduduk dari dan ke Bukittinggi setelah kemerdekaan

VII.1.3 Sistem Pemerintahan

Setelah kemerdekaan RI, sistem pemerintahan tradisional Minangkabau/ Sumatra Barat mengikuti sistem pemerintah resmi yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemimpin tradisional *tungku tigo sajarangan* tidak terdapat dalam struktur pemerintahan resmi, namun diberdayakan dalam pengambil keputusan sebagai bentuk adaptasi pemerintah tradisional ke pemerintah modern. Keputusan yang

¹³ Berdasarkan data sensus migrasi di Sumatra Barat, masyarakat yang lahir dan besar di Bukittinggi atau tinggal di Bukittinggi lebih dari lima tahun dikategorikan sebagai penduduk Bukittinggi

tidak melibatkan suara pemimpin tradisional bisa dibatalkan dan dianggap tidak sah. Konsep musyawarah dan mufakat yang mengakar dalam masyarakat Minangkabau tidak bisa dilepaskan dalam sistem pemerintah modern. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan pengaruh pemimpin tradisional *tungku tigo sajarangan* dalam merangkul masyarakat, terutama di daerah inti Minangkabau. Sistem ini berjalan hingga sekarang, terlihat dari ketidakberhasilan perluasan kota tahun 1999 karena adanya proses/ sistem yang terlewati.

VII.2 Peranan Kota Bukittinggi

Peranan Bukittinggi pada awal kemerdekaan dimulai dari penyebaran berita proklamasi Indonesia. Sebagai pusat pertahanan Jepang di Sumatra, Kantor berita Domei di Bukittinggi berhasil menerima berita kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pada malam hari oleh Ahmad Basya, pegawai PTT yang diperbantukan di Kantor Berita Domei. Berita proklamasi disebarluaskan sebanyak 10 (sepuluh) rangkap setelah diketik oleh Asri Aidid Sutan Rajo Nan Sati. Empat hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia (21 Agustus 1945), bendera merah putih untuk pertama kalinya berkibar di Jam Gadang.¹⁴ Teks lengkap proklamasi kemudian diantarkan oleh tiga orang Giyugun Bukittinggi ke Pekanbaru, yang tiba pada tanggal 30 Agustus 1945 (Abdullah and Budhisantoso, 1983, p. 125; Abdurakhman and Setiawan, 2018, pp. 93–94, 97).¹⁵ Berita proklamasi disebarluaskan oleh Giyugun Bukittinggi dan Padang ke semua wilayah Sumatra Barat. Wilayah yang menerima berita proklamasi di Pulau Sumatra dari Kantor Berita Domei Jakarta dan kurir dapat dilihat pada gambar VII.10.

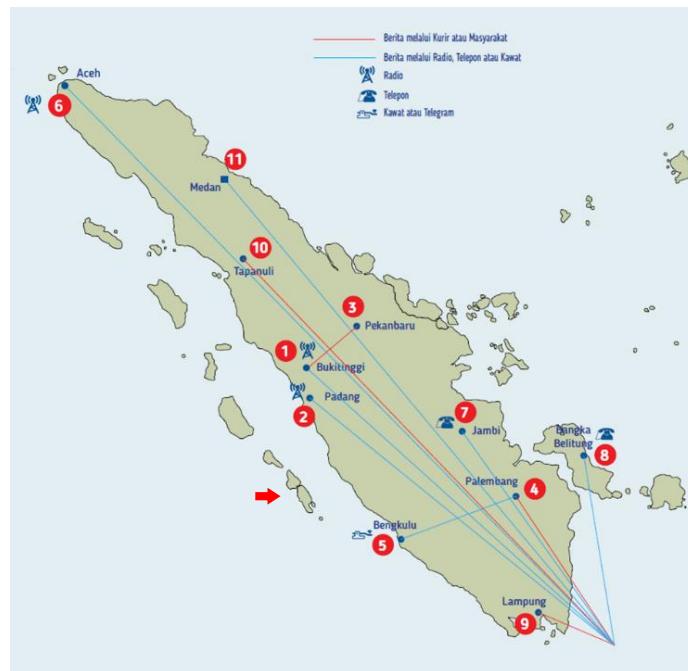
1. Pemerintahan

Peranan Bukittinggi di bidang pemerintahan skala regional dan nasional berlangsung hingga tahun 1979. Tahun 1947 Bukittinggi memiliki peranan ganda sebagai ibu kota Provinsi Sumatra, Ibukota Residen Sumatra Barat, calon

¹⁴ Sebelum Merah Putih dikibarkan, para pemuda Bukittinggi dibantu Iskandar Tedjasoekmana melakukan pendekatan damai kepada Walikota Bukittinggi/ Shi Yaku Sho Kolonel Ichiro Saito untuk penggantian bendera, tetapi ditolak secara tegas (Resamaili, 2007, p. 135)

¹⁵ Tiga orang Giyugun tersebut adalah Mansyurdin, Nur Rauf, dan Rajab.

ibu kota Provinsi Sumatra Tengah yang telah terbentuk tahun 1946,¹⁶ menjadi tempat bermukim wakil presiden Moh. Hatta, dan pusat divisi Banteng dalam memimpin perjuangan di Sumatra (Abdullah and Budhisantoso, 1983, p. 157).



Gambar VII.10 Wilayah penerima berita proklamasi Indonesia di Pulau Sumatra
(Abdurakhman and Setiawan, 2018, pp. 88–89)

Situasi keamanan ketika agresi militer Belanda pertama tahun 1947 menyebabkan ibukota Provinsi Sumatra pindah dari Medan ke Bukittinggi, sedangkan pada agresi militer Belanda kedua tahun 1948 menyebabkan peran Bukittinggi sebagai ibukota Provinsi Sumatra Tengah dibekukan. Ditahun yang sama Bukittinggi menjadi ibukota Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Situasi keamanan di Sumatra Barat dan Bukittinggi belum stabil hingga tahun 1960-an. Tahun 1958-1961 terjadi pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berpusat di Padang dan tahun 1965

¹⁶ 16-17 April 1946 Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra berkumpul di Bukittinggi memutuskan pembagian 3 sub-Provinsi Sumatra, yaitu 1) Sumatra Utara dengan pusat Medan, meliputi Keresidenan Aceh, Tapanuli, dan Sumatra Utara; 2) Sumatra Tengah dengan pusat Bukittinggi, meliputi Keresidenan Sumatra Barat, Riau, dan Jambi; 3) Sumatra Selatan dengan pusat Palembang, meliputi Keresidenan Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka-Belitung. Masing-masing sub-Provinsi dipimpin oleh Gubernur Muda (Abdullah and Budhisantoso, 1983, pp. 133–134; Asnan, 2006, p. 129)

munculnya PKI. Kedua kondisi ini mendorong terjadinya eksodus masyarakat Minangkabau ke Jakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, dan Lampung (Hamka, 1985, pp. 116–117; Naim, 1984, p. 264). Kondisi politik (keamanan) dan tuntutan ekonomi (pemerataan pembangunan) menyebabkan wilayah administrasi Pulau Sumatra dari tahun 1945-2002 telah mengalami sepuluh kali perubahan hingga membentuk 10 (sepuluh) provinsi. Demikian juga perubahan wilayah administrasi Sumatera Barat yang mengalami Sembilan kali perubahan wilayah administratif (lihat lampiran I). Perubahan ini tentunya mempengaruhi peran dan perkembangan Bukittinggi. Beberapa peran sekaligus menjadi tonggak perkembangan kotanya.

- 19/08/1945 Bukittinggi menjadi ibu kota Keresidenan Sumatra Barat dan ibu kota Luhak Agam berdasarkan hasil sidang hari kedua PPKI 19 Agustus 1945 dan Besluit No. R.I/I tertanggal 08 Oktober 1945 (Asnan, 2006, pp. 126–128)
- 09/08/1947 Bukittinggi menjadi ibu kota Provinsi Sumatra pada tanggal 09 Agustus 1947 mengantikan Medan, setelah Belanda menduduki Medan dalam agresi militer pertamanya tanggal 21 Juli 1947- 04 Agustus 1947. Penetapan ini dilakukan oleh Wakil Presiden Moh. Hatta (Abdullah and Budhisantoso, 1983, p. 182; Media, 2019)
- 15/04/1948 Bukittinggi menjadi ibu kota Provinsi Sumatra Tengah melalui UU No. 10/1948, namun kemudian dibekukan karena terjadinya Agresi Militer Belanda II (Asnan, 2006, pp. 129–133)
- 22/12/1948 Bukittinggi menjadi ibu kota Pemerintah Darurat Republik Indonesia hingga 13 Juli 1949 (Asnan, 2006, pp. 158–159; Hatta, 2011, p. 199; Kahin, 1997, pp. 254–257)
- 14/08/1950 Bukittinggi menjadi ibu kota Provinsi Sumatra Tengah melalui Perpu No.4 tahun 1950 hingga tahun 1956
- 19/08/1957 Bukittinggi menjadi ibu kota Provinsi Sumatra Barat berdasarkan UU Darurat No.19/1957. UU tersebut kemudian

diganti/ ditetapkan kembali melalui UU No. 61 Tahun 1958. Secara *de facto* ibu kota Provinsi Sumatra Barat pindah ke Padang tahun 1957 karena sulit mendapatkan lahan untuk pengembangan kota.

- 28/09/1979 Pemindahan ibu kota Provinsi Sumatra Barat ke Padang secara *de jure* melalui PP No. 29 Tahun 1979.
- 07/01/1998 Pemindahan ibu kota Luhak Agam dari Bukittinggi ke Lubuk Sikaping melalui PP No. 8 Tahun 1998. Pemindahan ibu kota Kabupaten Agam ditujukan untuk pemerataan pembangunan dan mencegah disparitas antara wilayah bagian timur dan barat. Peran Bukittinggi dalam pemerintahan secara regional semakin berkurang. Pembangunan fokus pada wilayah administratif Bukittinggi semenjak tahun 1998. Penggantian istilah *luhak* menjadi kabupaten merujuk pada UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pendidikan

Setelah kemerdekaan fungsi Bukittinggi sebagai pusat pendidikan kembali berjalan. Jumlah sarana pendidikan bertambah seiring dengan waktu dengan skala pelayanan Bukittinggi dan sekitarnya. Jumlah sarana pendidikan tahun 2016 meliputi: 38 TK, 59 SD, 11 SLTP, 23 SMA, 18 PT/ akademi, 2 MI (Madrasah Ibtidaiyah), 6 MTS (Madrasah Tsanawiyah), dan 6 MA (Madrasah Aliyah) (BPS Kota Bukittinggi, 2017). Beberapa sarana pendidikan yang berdiri sejak awal kemerdekaan dengan skala pelayanan regional adalah:

- a. Pendidikan Perwira Tinggi dibangun oleh komandan Divisi III Kolonel Dahlan Jambek dan diresmikan pada bulan Januari 1946. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan TNI AD / ABRI dan merupakan sekolah perwira darurat. Asrama angkatan pertamanya berada di Jalan Bukit Apit (Abdullah and Budhisantoso, 1983, p. 174; Akmil, 2019).
- b. Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukittinggi merupakan sekolah polisi pertama yang membuka kesempatan kepada wanita menjadi siswinya. Tanggal 01 September 1948 SPN Bukittinggi resmi menerima 6 (enam) siswi dan 44

(empat puluh empat) siswa.¹⁷ Pemerintah memberikan apresiasi kepada Kota Bukittinggi sebagai tempat kelahiran Polwan Indonesia (lihat gambar VII.11). Apresiasi ini berupa dibangunnya monumen polwan yang diresmikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Banoeroesman Astrosemitro pada tanggal 27 April 1993 (Husein et al., 1991; Polri, 2015).



POLWAN PERINTIS: Inilah enam gadis Minang yang menjadi perintis Polisi Wanita berfoto bersama dengan Kepala Polisi Sumatera Tengah Soelaiman Effendi di Bukittinggi tahun 1948. (Foto koleksi Adrin Kahar)



Foto monumen ini diambil tahun 2015 setelah selesai direnovasi

Gambar VII.11 Enam polwan pertama Indonesia dan monumen polwan di Bukittinggi (*Polri, 2015*)

- c. Akademi Pemerintah Dalam Negeri Bukittinggi dibentuk Mendagri pada dekade 1970-an bersamaan dengan APDN lainnya di 20 Provinsi (setelah APDN Nasional Malang dibangun tahun 1956). ¹⁸
- d. Fakultas Kedokteran serta Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam (FIPIA) berdiri di Bukittinggi pada tanggal 07 September 1955. Kedua fakultas ini pindah ke Padang tahun 1961 dan 1962. Fakultas Kedokteran masuk UNAND (Universitas Andalas) dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam masuk IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan) (MDSP, 2018; UNAND, 2019).

¹⁷ 01 September 1948 kemudian ditetapkan sebagai hari Polwan (Polisi Wanita) Indonesia. Enam Polwan tersebut adalah Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Loekman, Dahniar Sukotjo, Djasmainar, dan Rosnalia Taher (Polri, 2015)

¹⁸ Pada masa Belanda Bukittinggi memiliki sekolah pamong praja/ OSVIA yang dibangun tahun 1918. Untuk meningkatkan kualitas lulusan APDN yang hanya Diploma III, tahun 1967 dibangun Institut Ilmu Pemerintah (IIP) di Malang dengan program Strata-1. IIP kemudian dipindahkan ke Jakarta tahun 1972. Tahun 1988 dibuka kampus APDN Nasional kedua di Jatinagor. Tahun 1994 APDN kemudian berganti nama menjadi STPDN dan bergabung dengan IIP berdasarkan Keppres No.87/2004 dengan nama IPDN. Berdasarkan Keputusan Presiden No 1 Tahun 2009 dilakukan penataan dan operasionalisasi kampus induk (IPDN Cilandak dan Jatinagor) dan regionalisasi kampus IPDN di Bukittinggi, Pekanbaru, Makassar, dan Manado (Admin, 2011).

3. Ekonomi/ Perdagangan

Dalam bidang ekonomi dan perbankan, Bukittinggi diawal kemerdekaan pernah menjadi tempat percetakan Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatra (URIPS) yang sebelumnya berada di Pematang Siantar. ¹⁹ Harga satu rupiah URIPS sama dengan satu rupiah ORI (Oeang Republik Indonesia) dan seratus rupiah uang Jepang atau 1:100 (Abdullah and Budhisantoso, 1983, pp. 162–163). Beberapa contoh URIPS ini dapat dilihat pada gambar VII.12.



Gambar VII.12 Beberapa contoh uang Republik Indonesia Provinsi Sumatra (Budiman, 2014; Wikipedia, 2019)

¹⁹ Tanggal 26 Oktober 1946 Pemerintah Indonesia mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri yang dinamai ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat pembayaran yang sah. Namun karena ORI jumlahnya sangat terbatas, Provinsi Sumatra melalui Maklumat No. 92/KO tanggal 8 April 1947 mencetak dan mengedarkan uang dengan nama URIPS (Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatra) di Pematang Siantar. Pindahnya ibu kota Provinsi Sumatra akibat agresi militer Belanda pertama di Medan, juga memindahkan percetakan URIPS ke Bukittinggi. Selanjutnya URIPS dicetak di Bukittinggi (Abdullah and Budhisantoso, 1983, pp. 162–163)

Bukittinggi yang berkembang dari sebuah pasar terus menjalankan perannya sebagai pusat perdagangan skala regional hingga saat ini. Keberadaan Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Lereng, Pasar Banto, Pasar Aur Tajungkang, dan Pasar Aur Kuning sebagai sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Bukittinggi, yakni 33,59% dari total PDRB (BPS Kota Bukittinggi, 2017, pp. 323, 329–330). Skala pelayanan pasar di Bukittinggi tidak hanya melayani penduduk Sumatra Barat, tapi juga penduduk Provinsi Jambi dan Riau. Bahkan pedagang dari Malaysia juga berbelanja di Pasar Aur Kuning.

4. Pariwisata

Potensi alam yang indah dan kota yang sejuk menjadikan Bukittinggi sebagai daerah tujuan wisata alam. Sebagai kota yang memiliki peranan penting dari masa prakolonial-kolonial, banyak peninggalan objek sejarah yang ditemukan di kota ini, sehingga menjadikan Bukittinggi sebagai daerah tujuan wisata sejarah juga. Jenis wisata lain yang berkembang di Bukittinggi adalah wisata kuliner dan belanja. Bukittinggi yang berkembang dari sebuah *pakan* dan pernah menjadi pasar terindah dan tersibuk di Sumatra pada masa kolonial Belanda (Cluijsenaer, 1878, p. 11), sejak tahun 1990-an dikenal sebagai Tanah Abang kedua (pusat grosir yang juga menjual hasil-hasil kerajinan lokal seperti industri bordir, sulam tangan, dan songket). Potensi ini menjadikan Bukittinggi sebagai daerah tujuan wisata unggulan di Sumatra Barat.

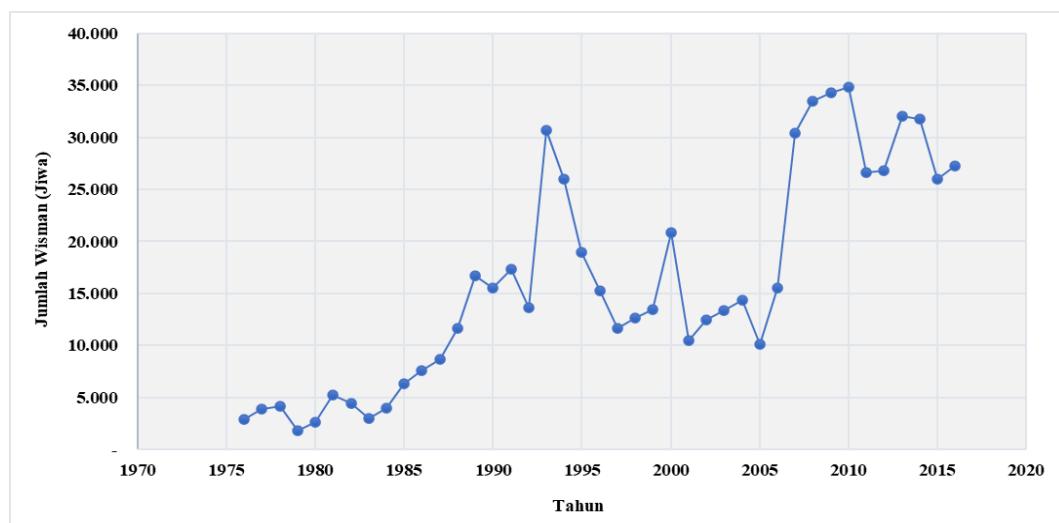
Setiap hari libur wisatawan nusantara (wisnu) dan mancanegara (wisman) memadati Kota Bukittinggi, sehingga kemacetan tidak bisa dihindari. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Bukittinggi tidak terdata dengan baik, sebaliknya jumlah wisatawan mancanegara terdata sejak tahun 1976 (lihat tabel VII.4 dan gambar VII.13). Jumlah kunjungan wisman tahun 1976 – 1997 didapatkan dari data Kepolisian Daerah Sumatra Barat Resort Agam, dan setelah tahun 1997 data wisman didapatkan dari Dinas Pariwisata yang terangkum dalam dokumen BPS Bukittinggi. Kunjungan wisman ke Bukittinggi mengalami fluktuasi, salah satunya karena faktor keamanan. Krisis moneter

yang dialami Indonesia turut mempengaruhi jumlah wisman. Wisatawan mancanegara yang paling banyak mendatangi Bukittinggi tahun 2016 adalah dari Malaysia, Belanda, Jerman, Jepang, Amerika, dan Perancis (tabel VII.5). Wisatawan dari Belanda dan Jepang menapaktilasi Bukittinggi sebagai salah satu wilayah penting jajahannya dimasa lalu.

Tabel VII.4 Jumlah wisatawan mancanegara ke Bukittinggi tahun 1976-2016

No.	Tahun	Jumlah Wisman (Jiwa)	No.	Tahun	Jumlah Wisman (Jiwa)	No.	Tahun	Jumlah Wisman (Jiwa)
1	1976	2.906	15	1990	15.552	29	2004	14.324
2	1977	3.869	16	1991	17.343	30	2005	10.146
3	1978	4.175	17	1992	13.614	31	2006	15.523
4	1979	1.788	18	1993	30.664	32	2007	30.428
5	1980	2.635	19	1994	25.991	33	2008	33.470
6	1981	5.185	20	1995	18.934	34	2009	34.345
7	1982	4.401	21	1996	15.228	35	2010	34.882
8	1983	3.012	22	1997	11.617	36	2011	26.629
9	1984	3.938	23	1998	12.673	37	2012	26.802
10	1985	6.328	24	1999	13.472	38	2013	32.068
11	1986	7.573	25	2000	20.888	39	2014	31.765
12	1987	8.684	26	2001	10.455	40	2015	25.970
13	1988	11.649	27	2002	12.478	41	2016	27.251
14	1989	16.734	28	2003	13.319			

(BPS Kota Bukittinggi, 2000, 2003, 2005, 2010, 2015, 2017; BPS Kotamadya Bukittinggi, 1980, 1984, 1989, 1992)



Gambar VII.13 Jumlah wisatawan mancanegara ke Bukittinggi tahun 1976-2016

Tabel VII.5 Jumlah wisatawan mancanegara berdasarkan asal negaranya ke Bukittinggi tahun 2016

No.	Asal Wisatawan Mancanegara	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1	Amerika	535	1,96%
2	Kanada	202	0,74%
3	Perancis	512	1,88%
4	Jerman	763	2,80%
5	Italia	167	0,61%
6	Belanda	3.112	11,42%
7	Inggris	356	1,31%
8	Malaysia	18.571	68,15%
9	Filipina	43	0,16%
10	Australia	321	1,18%
11	New Zealand	127	0,47%
12	Jepang	541	1,99%
13	Singapura	270	0,99%
14	Swedia	85	0,31%
15	Cina	182	0,67%
16	Taiwan	92	0,34%
17	Belgia	78	0,29%
18	Swiss	154	0,57%
19	Thailand	93	0,34%
20	Polandia	89	0,33%
21	Rusia	135	0,50%
22	Korea	365	1,34%
23	Lainnya	458	1,68%
Jumlah		27.251	100,00%

(BPS Kota Bukittinggi, 2017)

Perkembangan Bukittinggi tidak lepas dari fungsinya sebagai kota wisata. Beberapa bangunan peninggalan Belanda dan Jepang menjadi objek cagar budaya. Berbagai fasilitas akomodasi dibangun, mulai dari konsep modern hingga memadukan konsep tradisional-modern (lihat gambar VII.14).



a. Hotel The Hill (sebelumnya Novotel) yang berada di sebelah Istana Bung Hatta dan dekat Jam Gadang (Septiani, 2017)



b. Padi Ecolodge, penginapan yang berada di Ngarai Sianok dengan Arsitektur Modern Rumah Gadang (stars, 2021)

Gambar VII.14 Fasilitas akomodasi di Bukittinggi sebagai kota wisata

5. Kesehatan

Bukittinggi memiliki jumlah rumah sakit kedua terbanyak di Provinsi Sumatra Barat setelah Padang. Rumah sakit pertama dibangun pada masa Belanda, yakni rumah sakit militer (*garnisun*) yang berganti nama dengan RSUD Achmad Mochtar. Tahun 1965-1968 dibangun Rumah Sakit TNI AD TK IV. Rumah sakit swasta pertama di Bukittinggi adalah Ibnu Sina yang berdiri 30 Oktober 1969. Selanjutnya berdiri RS. Immanuel 1 Desember 1976.²⁰ Tanggal 30 Januari 2004 berdiri rumah sakit umum swasta Madina disusul dengan Rumah sakit khusus THT Sitawa Sidingin yang terregistrasi tahun 2012 (admin, 2016; PPK BLU, 2019; rsttkivbkt, 2020; Sajja, 2014; Yarsi Sumbar, 2016). Total ada enam rumah sakit, dengan rincian 3 (tiga) rumah sakit umum; 1 (satu) rumah sakit tentara; dan 2 (dua) rumah sakit khusus (otak dan THT). Semua rumah sakit ini memiliki skala pelayanan regional, walaupun status rumah sakit Tentara, Madina, dan THT Sitawa Sidingin memiliki tipe D sedangkan yang lainnya tipe B.

VII.3 Struktur Ruang Kota Bukittinggi

Perkembangan struktur ruang Bukittinggi ditinjau dari variabel jaringan transportasi, telekomunikasi, ekonomi, kompetisi global, sarana dan prasarana, pengembangan perumahan, desentralisasi, ketenagakerjaan, urbanisasi, gaya sentripetal dan sentrifugal, serta penduduk. Selanjutnya perkembangan ini dipetakan berdasarkan *built up area* tahun 1969, 1985, 1999, 2006, dan 2016 karena keterbatasan sumber dan kedalaman skala peta (lihat tabel VII.6)

1. Transportasi dan komunikasi

Bukittinggi yang terletak di pedalaman Sumatra Barat dapat diakses melalui jalur darat (kendaraan bermotor dan kereta api) serta jalur udara (melalui

²⁰ Rumah sakit Immanuel tahun 1982 berubah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Bukittinggi setelah diambil alih Departemen Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No.365/Menkes/SK/VIII/1982. RSUP Bukittinggi ditetapkan sebagai RSU Vertikal Kelas C. Tanggal 05 April 2005 melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 495/Menkes/SK/IV/2005 RSUP Bukittinggi ditetapkan sebagai rumah sakit khusus dengan nama Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi. Tanggal 18 Oktober 2019 pemerintah pusat kembali mengganti nama rumah sakit ini melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2019 dengan nama Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi (PPK BLU, 2019)

pelabuhan udara Gadut). Jalur kereta api Padang-Bukittinggi yang diresmikan tahun 1891 dan jalur Bukittinggi-Payakumbuh tahun 1896, ditutup tahun 1986 karena ketidakefektifan biaya operasional (kebijakan rasionalisasi lokomotif diesel yang membuat lokomotif uap diberhentikan). Di samping itu jalur yang ekstrim di Lembah Anai (menggunakan jalur bergigi), sarana dan prasarana yang sudah tua, serta persaingan dengan mobil angkutan umum dan pribadi menjadi alasan ditutupnya jalur kereta api Padang- Bukittinggi -Payakumbuh. (Cluijsenaer, 1878, p. 75; PJKA, 2016; Safwan et al., 1987, pp. 43–44).

Volume kendaraan yang terus meningkat menuju Bukittinggi pada hari libur membuat waktu tempuh Padang-Bukittinggi yang biasanya 2 jam, bisa mencapai lebih dari 4 jam. Jalur jalan yang tersedia di dalam dan menuju Bukittinggi tidak bisa menampung jumlah kendaraan setiap *weekend* dan hari libur. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 berencana mereaktivasi jalur kereta api sepanjang 300 km. Termasuk jalur Padang-Bukittinggi-Payakumbuh (Bilal, 2021).

Tabel VII.6 Sumber peta yang digunakan untuk struktur dan pola ruang Bukittinggi tahun 1945-2016

No.	Peta Tahun	Sumber Peta	Tahun diterbitkan	Skala Peta
1	1969	Direktorat Landuse 18 BA / Perpustakaan Nasional	1969	1 : 100.000
		Direktorat Landuse 17 BA DB 24.1 Blad 4/ Perpustakaan Nasional	1970	1 : 100.000
2	1985	Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri	1985	1 : 40.000
3	1999	Badan Informasi Geospatial	1999	1 : 50.000
4	2006	Google Earth	2006	1 : 45.000
5	2016	Bing Map Satelite	2016	1 : 45.000

Selain jalur darat, jalur udara menuju Bukittinggi yang tersisa setelah masa penjajahan adalah lapangan udara Gadut. Lapangan udara buatan Jepang ini tidak beroperasional lagi setelah tahun 1950. Tanah bekas lapangan udara

menjadi sengketa antara TNI AU dan masyarakat setempat hingga saat ini. Walaupun lapangan udara ini berada di luar Kota Bukittinggi (dulunya masuk wilayah Shi Yaku Sho/ Bukittinggi Baru), penyelesaian sengketa dan reaktivasi lapangan udara dipastikan akan memicu perkembangan Kota Bukittinggi dan Nagari Gadut khususnya. Jalur transportasi kereta api dan lapangan udara di Nagari Gadut dapat dilihat pada gambar VII.15.



- a. Pesawat Avro Ansoon RI-003 Desember 1947 di lapangan udara Gadut sebelum jatuh di Selat Malaka Malaysia (dakwahpost, 2021)
- b. Kereta Api Tujuan Bukittinggi Tahun 1960-1970 (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bukittinggi, 2018)

Gambar VII.15 Fasilitas transportasi udara dan darat (kereta api) di Bukittinggi

Jaringan informasi dan komunikasi peninggalan masa penjajahan terus berkembang mengikuti zaman, kecuali kantor berita Domei Jepang. Media cetak koran Haluan yang terbit pertama kali tahun 1948 di Bukittinggi,²¹ merupakan salah satu dari sembilan koran tertua di Indonesia setelah kemerdekaan RI yang masih eksis dengan format baru (Redaksi, 2016). Seiring waktu kantor dan percetakan media koran Haluan pindah ke Padang.

2. Ekonomi dan Kompetisi Global

Bukittinggi yang tumbuh dari sebuah pasar berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai pusat perekonomian skala regional hingga internasional. Jiwa dagang masyarakat Bukittinggi dan kemampuan berkompetisi membuat hasil kerajinan (*home industry* tenunan, sulaman tangan, bordir) dan makanan khasnya (Nasi Kapau) terkenal hingga keluar negeri. Hasil kerajinan *home industry* memiliki pangsa pasar negara tetangga Malaysia, Singapura, dan

²¹ Percetakan dan redaksi kemudian pindah ke Padang dan tahun 2010 berganti kepemilikan.

Brunai Darussalam. Perubahan jenis barang yang diperdagangkan dari masa ke masa dalam kompetisi global mengikuti permintaan pasar dan ketersediaan sumber daya/ barang. Dari lada, kopi, dan hasil kerajinan.²² Tahun 2016 Kota Bukittinggi menjadi daerah penyumbang PDRB kedua terbesar di Provinsi Sumatra Barat setelah Kota Padang (BPS Sumbar, 2017, p. 798).

3. Sarana Prasarana dan Pengembangan Perumahan

Pembangunan fisik Kota Bukittinggi yang awalnya terpusat di Jorong Guguak Panjang dan Aur Birugo kemudian menyebar ke semua jorong lainnya (tahun 1980 jorong berubah menjadi kecamatan). Status tanah ulayat di Bukittinggi tidak memungkinkan perumahan leluasa berkembang. Di Bukittinggi awalnya terdapat pengelompokan penduduk berdasarkan etnis. Seiring waktu pengelompokan ini mulai membaur kecuali permukiman penduduk etnis Cina, Batak, dan Nias yang berbeda keyakinan dengan penduduk Minangkabau yang identik dengan muslim (Viri, 2012). Jika menurut Colombijn & Cote' (2014) perpecahan ruang etnis²³ memudar setelah kemerdekaan di Indonesia dengan terbentuknya pola perumahan berdasarkan kelas sosial (orang kaya hidup dengan orang kaya dan orang miskin hidup dengan orang miskin), hal ini tidak terjadi di Bukittinggi. Peleburan penduduk tidak terjadi ketika terdapat perbedaan keyakinan, jadi bukan segresi etnis, segresi pendapatan, tapi segresi keyakinan.

4. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (UU No. 23 tahun 2014). Minangkabau telah menganut sistem otonomi daerah semenjak masa Kerajaan Pagaruyuang. Setelah kemerdekaan undang-undang desentralisasi

²² Pedalaman Minangkabau (termasuk Bukittinggi) dari abad ke-14 dan 15 merupakan daerah penghasil dan pemasok lada ke Kesultanan Aceh yang kemudian dijual ke pasar dunia. Sebelumnya pedalaman Minangkabau terkenal daerah penghasil emas sehingga Pulau Sumatra dikenal dengan Swarnadwipa (tidak termasuk Bukittinggi/ wilayah Agam) (Reid, 2011)

²³ Ruang etnis yang dimaksud adalah ruang yang didiami oleh etnis/ suku tertentu atau pengelompokan ruang berdasarkan etnis/ suku, seperti permukiman orang Cina, Batak, Jawa, dan Arab.

mengalami beberapa kali perubahan. Undang-undang ini mencegah pembangunan yang sentralistik. Desentralisasi Indonesia pada masa orde lama diatur melalui UU No. 1 tahun 1945, UU No. 22 tahun 1948, dan UU No. 1 tahun 1957. Daerah diberi keleluasaan yang besar untuk berotonomi. Pascadekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 pemerintahan daerah bernuansa sangat sentralistik. Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah semakin tinggi, hal ini menjadi pemicu munculnya PRRI di Sumatra Barat.

Pada masa orde baru, UU No.1 Tahun 1957 dirubah menjadi UU No. 5 Tahun 1974. Dalam pasal 72 disebutkan wilayah kabupaten/kotamadya terdiri dari beberapa kecamatan. Bukittinggi yang terdiri dari lima jorong, tahun 1980 wilayah administratifnya berubah menjadi tiga kecamatan. Nagari-nagari di Sumatra Barat berubah menjadi desa. Perubahan ini tentunya berdampak terhadap pembangunan dan perkembangan kota.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998 menggulingkan pemerintah orde baru. Masa reformasi (masa pemerintahan setelah orde baru) mengganti undang-undang pemerintah daerah No. 5 tahun 1974 dengan UU No. 22 Tahun 1999. Lima tahun kemudian undang-undang tersebut diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan tahun 2014 menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan satu kota minimal terdiri dari empat kecamatan, sementara Bukittinggi hanya memiliki tiga kecamatan dengan luas 25,24 km². Keberadaan pasal dan undang-undang tersebut tidak merubah wilayah administrasi Bukittinggi, sama halnya dengan PP No. 84 tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi yang ditolak masyarakat (PP No. 40 Tahun 1980; PP No. 84 Tahun 1999; Sagala, 2016).

5. Penduduk, Ketenagakerjaan, Urbanisasi, Gaya Sentripetal dan Sentrifugal
- Bukittinggi merupakan kota yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatra Barat. Tahun 2016 kepadatannya mencapai 4.941,16 jiwa/km² atau sekitar 50 jiwa/ha (BPS Sumbar, 2017, p. 165) Magnet Bukittinggi menarik penduduk bermukim dan berwisata sangatlah tinggi (gaya

sentripetal) dan menjadikannya sebagai rantau kota.²⁴ Namun begitu masyarakat Bukittinggi juga suka merantau seperti masyarakat Minangkabau lainnya. Tujuan merantauanya untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik/ tinggi. Bukti Bukittinggi yang menjadi daerah tujuan rantau kota telah dibahas pada sub bab VII.1.2.

Tahun 1999 prosentase ketenagakerjaan penduduk Bukittinggi mencapai 54,61 % dari jumlah penduduk. Lapangan usaha perdagangan merupakan sektor yang paling banyak menyedot tenaga kerja, yakni 40,55 % dari total penduduk yang bekerja, disusul sektor jasa sebanyak 29,80% (BPS Kota Bukittinggi, 2000, p. 26). Tahun 2016 terjadi pergeseran lapangan usaha dari penduduk yang bekerja. Sebanyak 49,09 % bekerja menjadi buruh/ karyawan/ dan pegawai, prosentase kedua disusul dengan kegiatan usaha sendiri (wiraswasta) sebanyak 20,44 % (BPS Kota Bukittinggi, 2017, p. 75). Data ketenagakerjaan memperlihatkan fungsi Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan jasa didukung dengan sumber daya ketenagakerjaannya.

Variabel struktur ruang di atas dipetakan berdasarkan lahan terbangun. Kecamatan Guguak Panjang yang menjadi pusat Kota Bukittinggi memiliki proporsi lahan terbangun yang lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Sejak masa pendudukan Belanda, tanah ulayat di Guguak Panjang banyak dilepaskan oleh para ninik mamak sehingga para pendatang bisa menyewa dan memiliki tanah di Bukittinggi. Berbagai fasilitas perkotaan dan permukiman yang tertata berada di sini. Tanah ulayat yang masih terjaga kebanyakan berada di Tigo Baleh.

Perkembangan lahan terbangun Kota Bukittinggi setelah penolakan perluasan kota tahun 1999 tidak terlalu tinggi. Dari tahun 1999-2006 penambahan luas lahan terbangun hanya sekitar 3,03 % dari total luas kota. Merujuk PP No. 84 Tahun 1999 dan digitasi lahan terbangun Bukittinggi tahun 2016, diketahui perkembangan fisik Kota Bukittinggi telah melebihi daya dukung lahan yang hanya 44,86 % dari total

²⁴ Rantau kota merupakan bentuk asli urbanisasi masyarakat Minangkabau, yaitu merantau ke daerah-daerah yang menjadi kota di Minangkabau (Naim, 1984)

wilayah, yakni sekitar 46,38 % dari total luas wilayah (lihat tabel VII.7 dan gambar VII.16).

Tabel VII.7 Luas dan prosentase lahan terbangun per kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 1959-2016

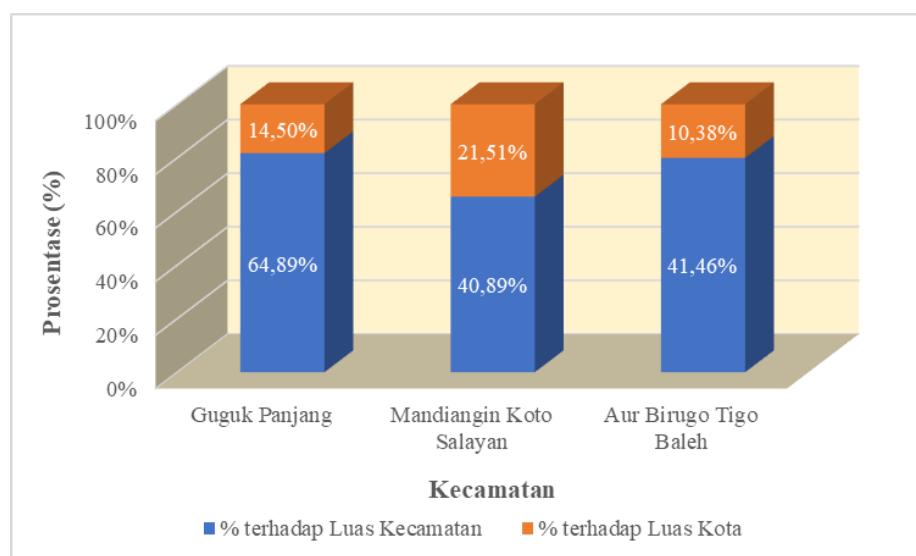
No.	Tahun	Luas Lahan Terbangun (Km ²)				% Lahan Terbangun terhadap Kecamatan (Km ²)			
		a	b	c	d	a	b	c	d
1	1954	1,06	0,81*	0,73#	2,61	18,79	6,10*	11,55#	10,34
2	1969	2,58	1,87*	2,08#	6,53	45,74	14,08*	32,91#	25,87
3	1985	2,66	2,82	2,41	7,89	47,16	21,23	38,13	31,26
4	1999	3,16	4,18	2,28	9,62	56,03	31,48	36,08	38,11
5	2006	3,12	4,86	2,39	10,36	55,32	36,60	37,82	41,05
6	2016	3,66	5,43	2,62	11,71	64,89	40,89	41,46	46,39
Luas Kecamatan		5,64	13,28	6,32	25,24				

Keterangan:

- a. Kecamatan Guguk Panjang
- b. Kecamatan Mandiangin Koto Salayan
- c. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
- d. Kota Bukittinggi

* Kecamatan Mandingian Koto Salayan pengabungan dari Jorong Mandiangin dan Jorong Koto Salayan

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh penggabungan dari Jorong Aur Birugo dan Tigo Baleh



Gambar VII.16 Prosentase lahan terbangun terhadap luas kecamatan dan kota tahun 2016

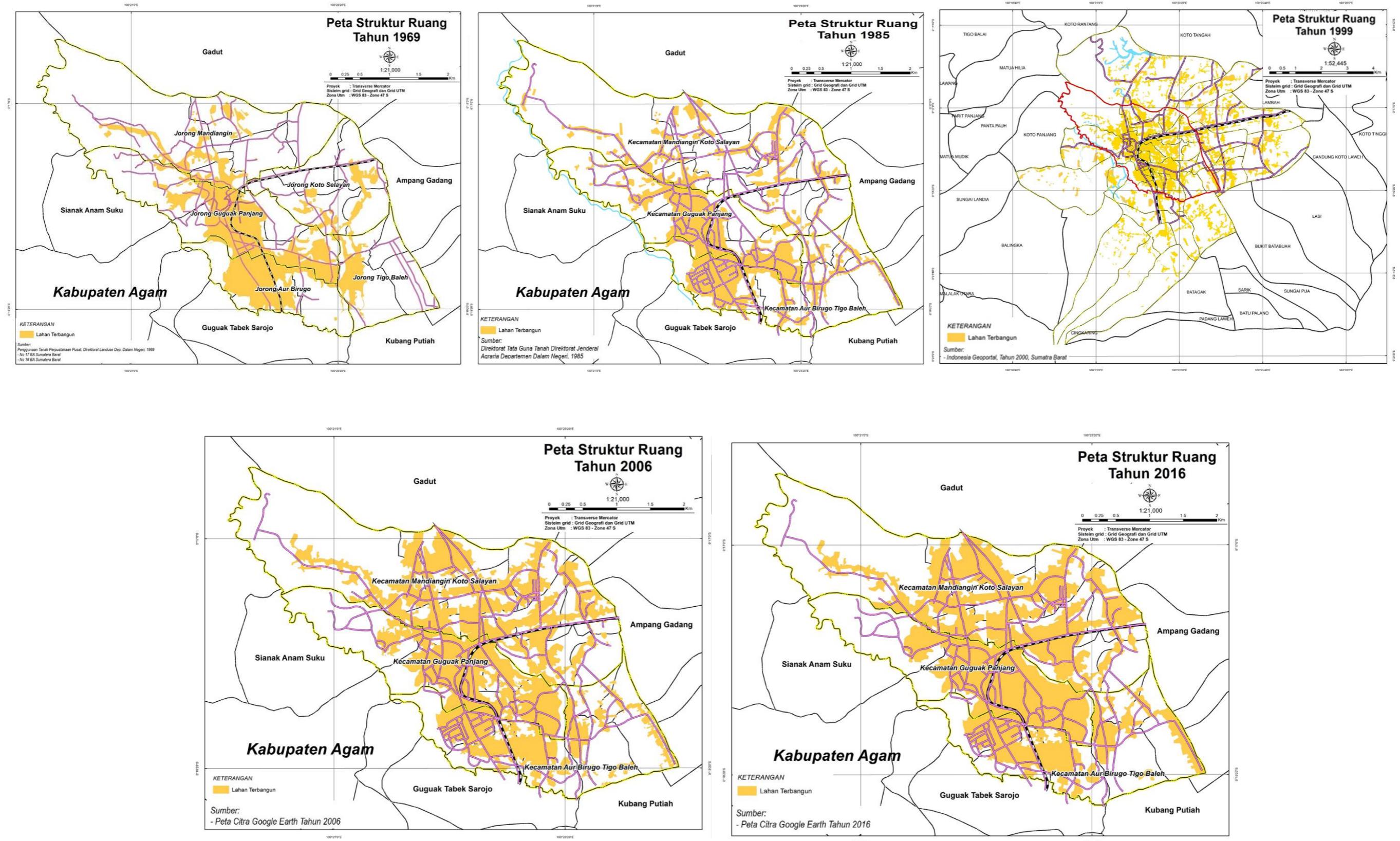
Struktur ruang Kota Bukittinggi pada tahun 1943 membentuk pola radial kosentrik dan terserak. Selanjutnya pembangunan lahan terbangun di Bukittinggi mengisi ruang-ruang yang kosong (interstisial), hingga membentuk pola kosentrik yang lebih kompak dan besar hingga tahun 2016 (lihat gambar VII.17).

VII.4 Pola Ruang Kota Bukittinggi

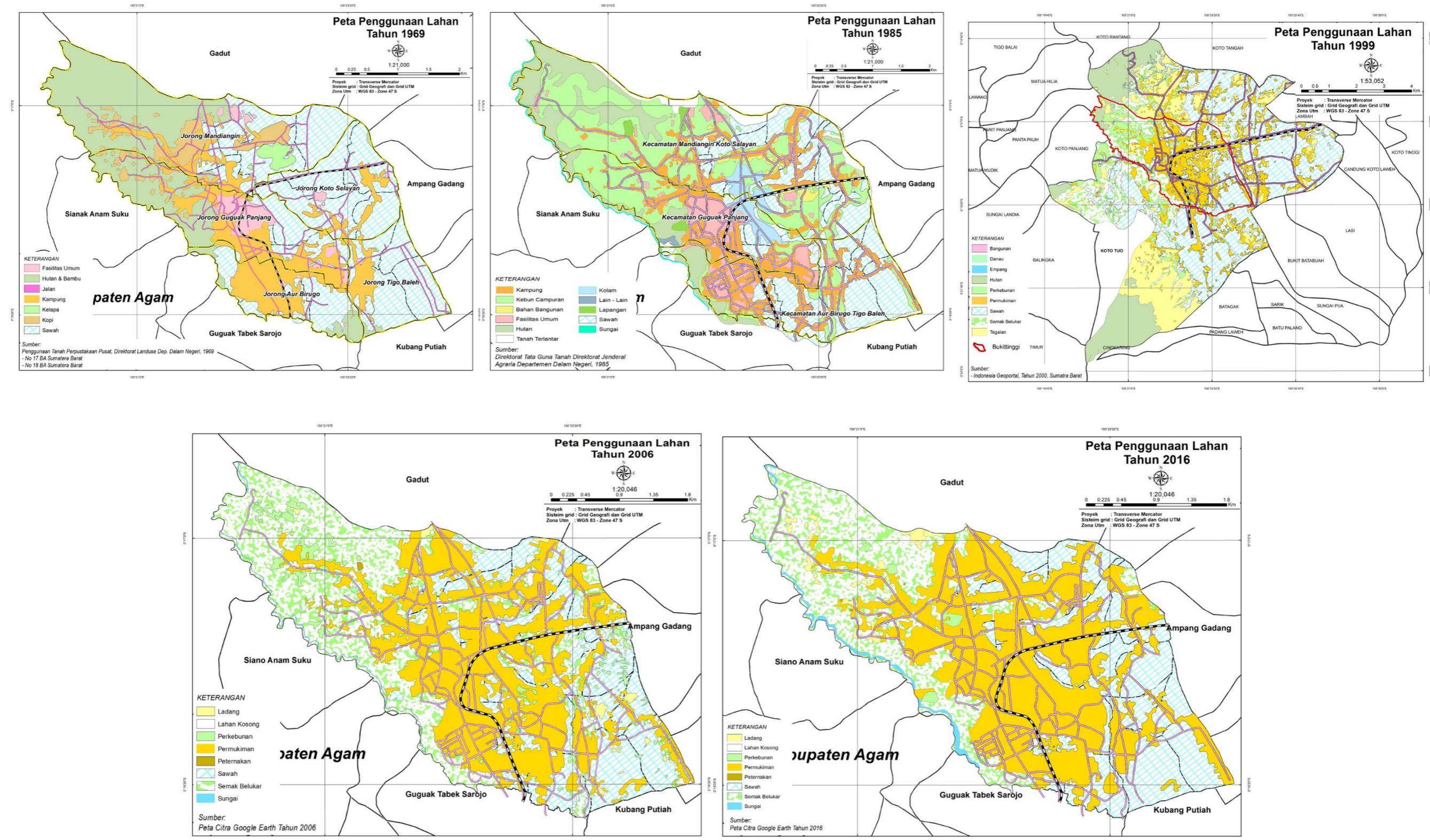
Dinamisnya perkembangan Kota Bukittinggi dapat dilihat dari perubahan pola penggunaan lahan dan lahan terbangun. Tanaman kopi sebagai komoditas ekspor menjadi tanaman wajib di masa pendudukan Belanda, namun setelah tahun 1860 komoditas ekspor kopi mulai menurun demikian juga luas lahannya. Luas kebun kopi pada tahun 1969 sekitar 124 ha, tersebar di Mandiangin dan Guguak Panjang (daerah yang lebih tinggi). Setelah tahun 1985 tidak ditemukan lagi kebun kopi di Bukittinggi. Perekonomian Bukittinggi ditumpang oleh sektor perdagangan. *Home industry* berkembang di rumah-rumah penduduk yang tidak memerlukan lahan khusus.

Kebutuhan lahan telah mengkonversi sawah-sawah di Bukittinggi menjadi lahan terbangun, terutama di daerah Guguak Panjang dan Aur Birugo. Peta bing map satelit Kota Bukittinggi tahun 2016 menunjukkan penggunaan lahan sawah masih banyak terdapat di daerah Tigobaleh, tempat permukiman pertama masyarakat Kurai. Daerah hijau lainnya terdapat di bagian utara dan barat. Bagian utara merupakan daerah perbukitan yang banyak ditanami semak belukar/ ladang. Bagian barat merupakan Ngarai Sianok yang dilalui Patahan Semangko dan mengakibatkan semua wilayah Kota Bukittinggi rawan gempa bumi (lihat tabel VII.8, gambar VII.18, dan lampiran G- penggunaan lahan secara detail).

Bukittinggi secara umum memiliki indeks risiko multiancaman sedang dengan skor 130. Rincian indeks risiko per bencana adalah: bencana gempa bumi dengan indeks risiko tinggi (skor 32,40); tanah longsor dengan indeks risiko tinggi (skor 24); kebakaran lahan dan hutan dengan indeks risiko bencana tinggi (skor 36), cuaca ekstrim dengan indeks risiko bencana tinggi (skor 13,60), dan kekeringan dengan indeks risiko bencana tinggi (skor 24) (BNPB, 2020, pp. 40, 60, 206, 240, 260, 292, 310). Potensi bencana ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam pembangunan dan pemanfaatan lahan. Lokasi yang berisiko tinggi adalah jalur sungai/ Batang Sianok di Ngarai Sianok dan sekitarnya yang merupakan jalur Patahan Semangko.



Gambar VII.17 Perkembangan struktur ruang Kota Bukittinggi tahun 1969 -2016



Gambar VII.18 Perkembangan penggunaan lahan di Kota Bukittinggi tahun 1969-2016

Tabel VII.8 Penggunaan lahan di Kota Bukittinggi tahun 1969 – 2016

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)				
		1969	1985	1999	2006	2016
1	Fasilitas Umum	81.85	131.04	49.96	-	-
2	Hutan	-	288.05	67.35	-	-
3	Hutan & Bambu	644.27	-	-	-	-
4	Industri Bahan Bangunan	-	31.05	-	-	-
5	Jalan	118.14	291.52	-	-	-
6	Jalan Kereta Api	-	7.36	-	-	-
7	Kampung/Permukiman	450.80	358.90	910.27	1,037.01	1,170.64
8	Kawasan Perkotaan	-	-	-	-	-
9	Kebun Campuran	-	684.60	-	-	-
10	Kebun Kelapa	28.39	-	-	-	-
11	Kebun Kopi	123.81	-	-	-	-
12	Kolam	-	59.87	-	-	-
13	Lahan Kosong	-	-	-	2.88	0.96
14	Lapangan	-	17.25	-	-	-
15	Perkebunan	-	-	187.37	66.04	20.13
16	Peternakan	-	-	-	1.57	0.99
17	Sawah	1,076.85	639.82	594.75	537.92	597.47
18	Semak Belukar	-	-	436.51	854.03	673.56
19	Sungai	-	2.42	3.90	7.45	27.30
20	Tanah Terlantar	-	6.87	-	-	-
21	Tegalan/Ladang	-	-	274.00	17.22	33.06
22	Lain - Lain	-	5.36	-	-	-
Luas Total		2,524.11	2,524.11	2,524.11	2,524.11	2,524.11

(BIG, 1999; Bing Map Satellite Imagery, 2016; Direktorat Landuse Departemen Dalam Negeri, 1969, 1970; Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, 1985; Google Earth, 2006)

Penggunaan lahan terbangun tahun 1985 – 1999 melonjak cukup tinggi dan tahun 2006-2016 luas lahan terbangun meningkat tidak terlalu tinggi. Data ini menunjukkan percepatan pembangunan kota. Berbagai fasilitas perkotaan dan permukiman dibangun. Luas lahan pertanian semakin berkurang seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan.

Sawah, semak belukar, dan permukiman penduduk merupakan penggunaan lahan di sekitar Ngarai Sianok tahun 2016. Permukiman ini umumnya tidak memiliki ijin dan sangat berisiko terhadap bencana alam (lihat gambar VII.19). Salah satu mamangan dalam aturan penggunaan lahan di Minangkabau adalah *nan lambah*

kubangan kabau (daerah lembah diperuntukan sebagai kubangan gembala/ kerbau). Karena keterbatasan lahan, kearifan budaya ini dilanggar dan tumbuh permukiman penduduk. Ngarai Sianok oleh Belanda disebut *karbouwengat*, karena pada masa itu banyak kerbau yang mencari makan dan mandi di Ngarai Sianok. Pola permukiman *baumpuak* masih banyak terdapat di pinggiran Kota Bukittinggi yang tanah ulayatnya masih terjaga dan penduduknya tidak terlalu tinggi, seperti di Tigo Baleh, Koto Salayan, dan Mandiangin.



(Getty, 2016)



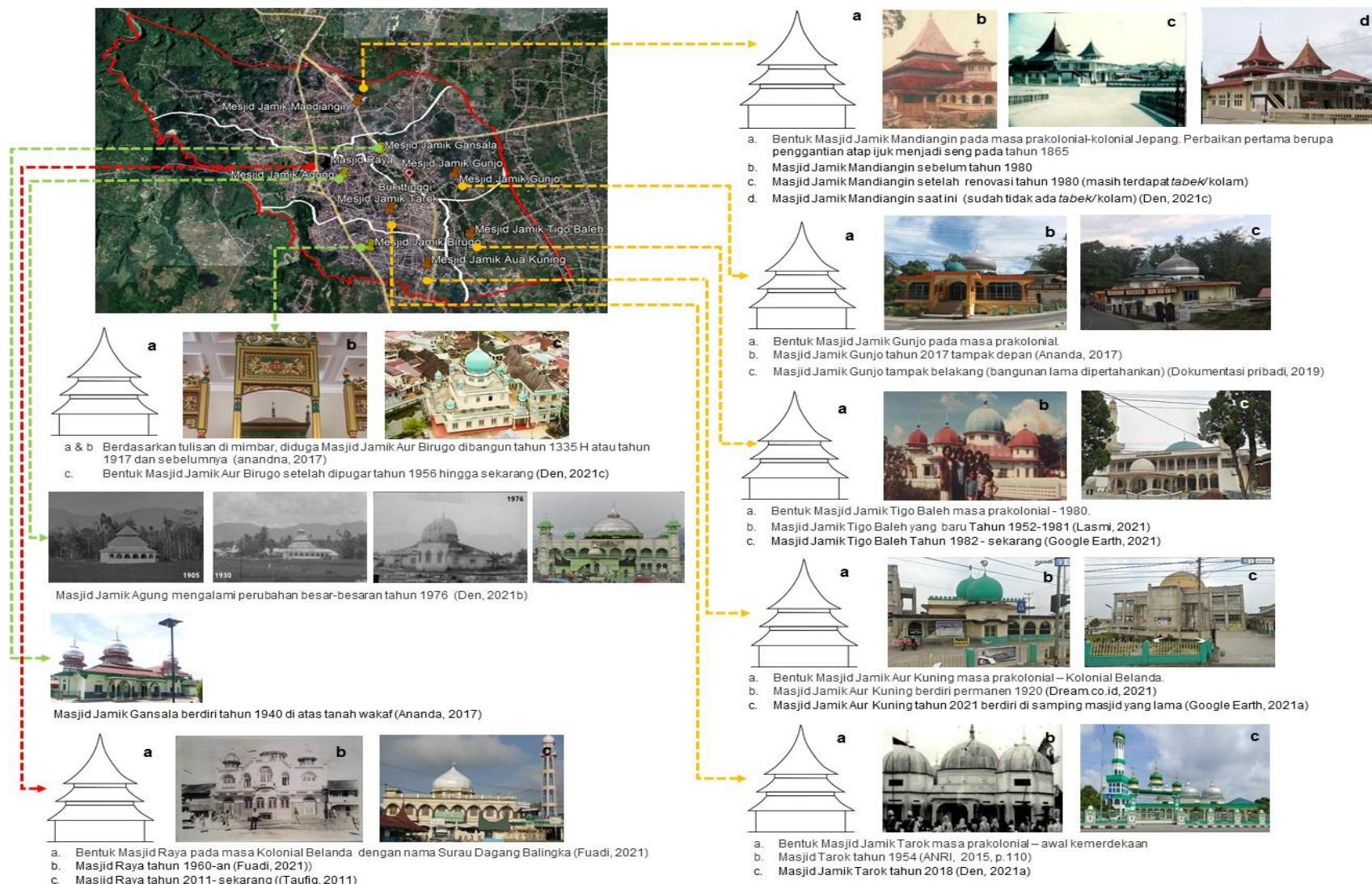
(Yudvi, 2016)

Gambar VII.19 Penggunaan lahan di Ngarai Sianok tahun 2016

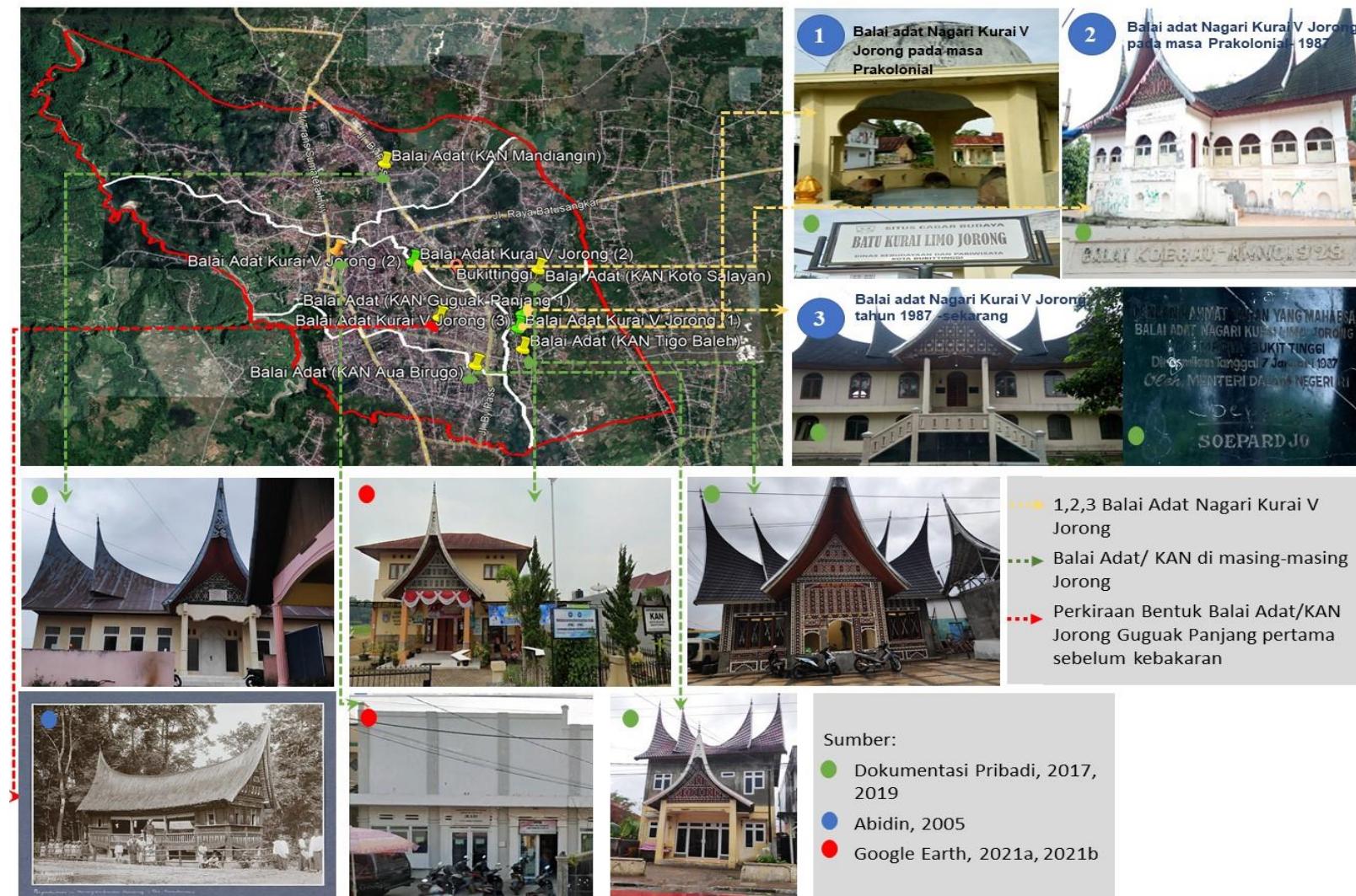
VII.5 Elemen Ruang Kota Bukittinggi

Pembangunan elemen ruang Kota Bukittinggi setelah kemerdekaan dimulai sejak berakhirnya pemerintahan orde lama (Zulqayyim, 2015, p. 157). Elemen ruang berupa fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, wisata, dan fasilitas lainnya dibangun sesuai kebutuhan.

Pascakemerdekaan keberadaan elemen ruang Nagari Kurai V Jorong masih banyak yang terjaga, namun disayangkan bentuk aslinya sudah berubah akibat laluk dimakan umur dan dibangun kembali dengan arsitektur modern, seperti bangunan masjid jamik (lihat gambar VII. 20). Elemen balai adat Nagari Kurai V Jorong di masa prakolonial yang berada di Pakan Labuah kemudian dipindahkan ke Pakan Kurai, dan pada tahun 1928 (masa kolonial Belanda) balai adat ini dibangun kembali secara permanen. Setelah kemerdekaan balai adat Nagari Kurai V Jorong dipindahkan kembali ke Pakan Labuah dengan bangunan baru dan diresmikan tahun 1987 (lihat gambar VII.21)



G a m b a r VII.20 Transformasi perubahan bentuk Masjid Jamik dan Masjid Raya di Bukittinggi dari waktu ke waktu



Gambar VII.21 Lokasi elemen balai adat Nagari Kurai V Jorong dari waktu ke waktu dan sebaran Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Merujuk peta Fort de Kock 1945, elemen ruang yang dibangun Belanda hingga tahun 2016 sebagian besar masih ada, namun tidak semua terjaga dengan baik.²⁵ Beberapa bekas bangunan Belanda rusak dan terbengkalai akibat keterbatasan anggaran dan perselisihan kepemilikan. Kondisi elemen ruang peninggalan Belanda berdasarkan survei lapangan dikelompokkan berdasarkan tipologi Ashworth (1998) dalam Gospodini (2004, pp. 23–24) dan temuan lapangan.

Pengelompokan bangunan bersejarah/ heritage menurut tipologi Ashworth tersebut adalah: 1) *museumification*, yakni bentuk bangunan tetap namun fungsinya berubah, 2) *eradification*, yakni penghancuran bangunan bersejarah baik yang disengaja (karena modernisasi, perubahan rezim politik dan budaya) ataupun tidak disengaja (karena bencana alam dan perang). Di lapangan kategori bangunannya dibagi menjadi enam kelompok, yakni: 1) bangunan asli dan fungsinya asli, 2) bangunan asli namun fungsinya baru/ *museumification*, 3) bangunan baru namun fungsinya tetap, 4) bangunan baru dan fungsinya baru/ *conversion*, 5) bangunan terbengkalai/ rusak, 6) bangunan sudah hancur atau dihancurkan/ *eradification*. Hasil observasi lapangan keberadaan elemen Belanda berdasarkan peta townplan dapat dilihat pada tabel VII.9 dan gambar VII. 22.

Tabel VII.9 Kondisi elemen ruang yang dibangun Belanda tahun 2016

No Bangunan di peta	Elemen	A	B	C	D	E
1	Hotel Park				V	
2	Sekolah Pribumi Berbahasa Belanda			V		
3	Kuburan Belanda					V
4	Rumah Sakit	V				
5	Pasar Ternak				V	
6	Rumah Potong Ternak	V				
7	Benteng Fort De Kock (<i>Sterreschans-ruin</i>)				V	
8	Lapangan Sepakbola	V				
9	Sekolah Pribumi Berbahasa Belanda			V		
10	Kantor of B.O.W					V

²⁵ Elemen ruang yang dibangun Belanda berdasarkan peta Fort de Kock tahun 1945 adalah sebanyak 61 elemen, sedangkan berdasarkan peta Fort de Kock tahun 1948 NEFIS terdapat 90 elemen (110 Map, 1945; NEFIS/CMI, 1948).

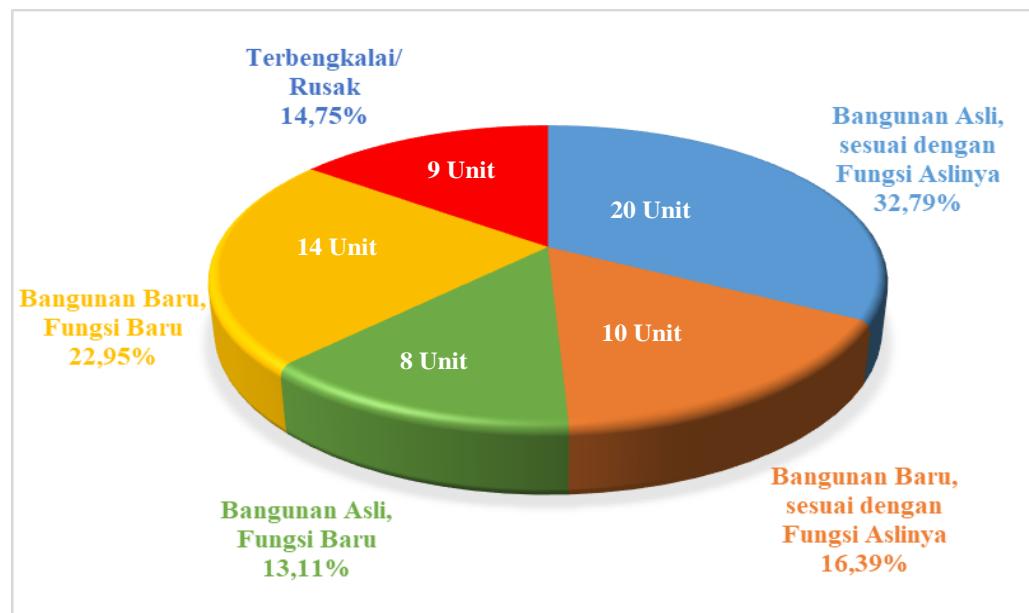
No Bangunan di peta	Elemen	A	B	C	D	E
11	Workshop B.O.W					V
12	Tower Air	V				
13	Kebun Binatang		V			
14	Kolam Renang					V
15	Hotel Empress	V				
16	Bioskop			V		
17	Toko China	V				
18	Pasar Pusat		V			
19	Bioskop (Gloria)		V			
20	Pasar Sayuran		V			
21	Kebun Kayu Pemerintah (Gudang)				V	
22	Masjid		V			
23	Penjara					V
24	Penggadaian		V			
25	Bioskop	V				
26	Jam Gadang	V				
27	Pos Polisi				V	
28	Pom Bensin				V	
29	Terminal Bus dan Mobil				V	
30	Rumah Asisten Residen				V	
31	Kantor Asisten Residen				V	
32	Landraad (Pengadilan Negeri)				V	
33	Sekolah Pribumi Berbahasa Belanda				V	
34	Rumah Komisaris Distrik				V	
35	Bank Kredit Rakyat		V			
36	Toko Eropa (<i>Padang Departement Store</i>)				V	
37	Sekolah Pemerintah	V				
38	Kantor Kotamadya				V	
39	Club Belvedere			V		
40	Sekolah Eropa	V				
41	Kantor Pos		V			
42	Sekolah China (Kristen)	V				
43	Biara	V				
44	Gereja Katolik	V				
45	Hotel Centrum					V
46	B.P.M Gudang Minyak					V
47	Gudang Barang Stasiun			V		
48	Stasiun Kereta Api					V
49	Kantor Telepon		V			
50	Hotel Kecil Eropa					V
51	Gereja Protestan	V				
52	Tempat Olahraga Militer dan Lapangan Parade	V				
53	Klub Militer	V				
54	Barak Militer	V				

No Bangunan di peta	Elemen	A	B	C	D	E
55	Tempat Olahraga Militer dan Lapangan untuk Latihan	V				
56	Dua Lapangan Tenis			V		
57	Pesantren Puteri				V	
58	Masjid		V			
59	Sekolah Dasar Pribumi (<i>Kweek School</i>)	V				
60	Barak Polisi	V				
61	Kantor PLN			V		

(Survei Lapangan, 2017)

Keterangan:

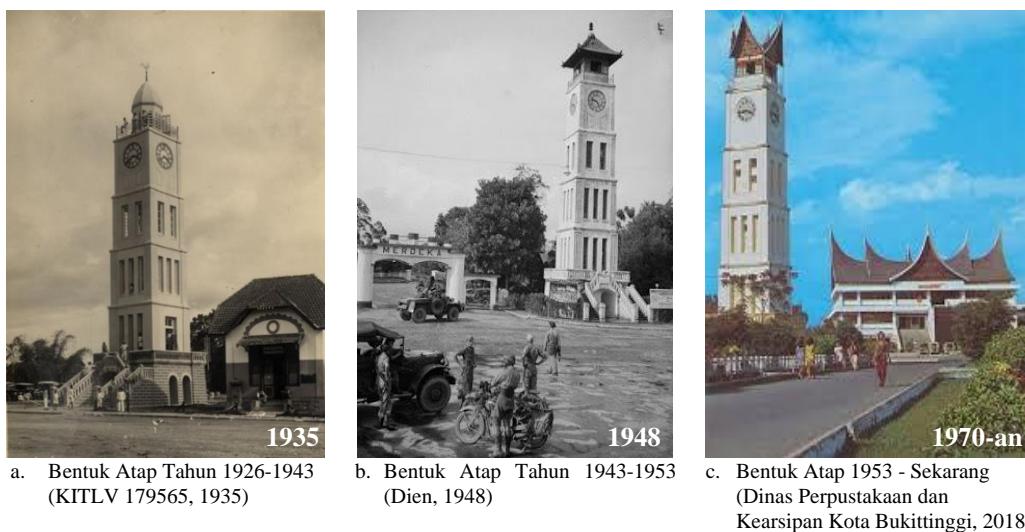
- A Bangunan asli, sesuai dengan fungsi aslinya
- B Bangunan baru, sesuai dengan fungsi aslinya
- C Bangunan asli, fungsi berubah/baru (*museumification*)
- D Bangunan baru, fungsi baru (*conversion*)
- E Terbengkalai/ rusak
- F Penghilangan artefak/ hancur (*eradification*)



Gambar VII.22 Kondisi elemen ruang Belanda pada tahun 2016

Seiring dengan waktu, jam gadang yang dibangun tahun 1926 pada masa pendudukan Belanda menjadi *landmark* dan simbol Kota Bukittinggi. Jam Gadang telah tiga kali mengalami perubahan bentuk, yakni 1) masa pendudukan Belanda, bentuk asli atap Jam Gadang berupa kubah yang bertengger ayam jantan di atasnya. 2) Masa pendudukan Jepang, atap jam gadang diganti berbentuk pagoda pada tahun

1943. 3) Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1953 ²⁶ atap Jam Gadang dirubah menjadi atap gonjong dengan motif ukiran pucuk rebung sebagai identitas budaya Minangkabau. Tranformasi bentuk atap Jam Gadang dapat dilihat pada gambar VII. 23.



Gambar VII.23 Transformasi bentuk atap Jam Gadang

Pasar atas sebagai pusat perdagangan Bukittinggi pada masa Belanda sudah dilengkapi dengan fasilitas ibadah Surau Dagang Balingka, yang didirikan para pedagang yang berasal dari Nagari Balingka Luhak Agam. *Urang Minang* (dalam hal ini Bukittinggi) yang identik dengan Islam kemudian merenovasi Surau Dagang Balingka menjadi Masjid Raya Bukittinggi (Abdullah and Budhisantoso, 1983, p. 29; ANRI, 2015, p. 110). Sejak menjadi Masjid Raya, masjid ini sudah tiga kali mengalami perubahan bentuk.

Elemen ruang lainnya yang dibangun pemerintah dan swasta sebagian telah diuraikan dalam sub bab di atas. Elemen ruang Kota Bukittinggi memiliki simbol/ciri sesuai dengan masanya. Pertama, masa prakolonial dengan rumah gadang/ atap gonjong sebagai simbol elemen ruangnya. Kedua, periode kolonial dengan Jam gadang sebagai simbolnya. Ketiga, periode pembangunan identitas Indonesia yang

²⁶ Tahun penggantian atap ini berdasarkan dokumen sejarah yang terdapat dalam bangunan Jam Gadang yang dikunjungi pada tanggal 13 Agustus 2009.

disimbolkan dengan banyaknya pembuatan patung/ monument seperti tugu pahlawan yang dibangun tahun 1963. Keempat, periode kebangkitan identitas Minangkabau dari tahun 1975 yang simbolkan dengan atap gonjong pada setiap bangunan pemerintah. Kelima, periode globalisasi mulai tahun 1990 yang ditandai dengan masuknya perusahaan internasional ke Bukittinggi dengan simbol pembangunan Novotel dan restoran Kentucky (Nas and Bakel, 2004, pp. 465–469). Simbol kebangkitan identitas Minangkabau masih berjalan hingga sekarang, bangunan pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan umum memiliki atap dan gapura gonjong. Contoh elemen ruang kota dengan simbol bangunannya dapat dilihat pada gambar VII. 24.



Gambar VII.24 Periodesasi simbol elemen bangunan di Bukittinggi

VII.6 Rangkuman

Sejarah perkembangan Kota Bukittinggi dalam perspektif ruang dan budaya pada masa pascakolonial (1945-2016) memiliki kebaruan sebagai berikut:

1. Interpretasi baru dari data lama (sumber data sama), seperti:
 - Data jumlah penduduk Bukittinggi di awal kemerdekaan.²⁷ Interpretasi baru dituliskan dalam sub bab VII.1.2.
2. Sejarah/ data baru dari sumber yang belum terpublikasi dalam sejarah perkembangan kota Bukittinggi sebelumnya
 - Perkembangan struktur ruang dan pola ruang dari tahun 1945 - 2016, serta elemen ruang tahun 1948 (data dari NEFIS)
 - Wacana perluasan kota dan konsep ruangnya tahun 1983 yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Induk Kota Bukittinggi tahun 1984-2004
 - Data penduduk Bukittinggi semenjak sensus pertama 1961 hingga tahun 2016 secara *timeseries* dari satu sumber Badan Pusat Statistik.²⁸
 - Pemetaan perkembangan wilayah administrasi di Pulau Sumatra dan Provinsi Sumatra Barat (lihat lampiran I).

Selain kebaruan penelitian di atas, berikut rangkuman sejarah perkembangan Kota Bukittinggi dalam perspektif ruang dan budaya pada masa pascakolonial dari tahun 1945 hingga tahun 2016.

Struktur ruang Kota Bukittinggi tahun 1943 membentuk pola radial kosentrik dan terserak. Pola ini terus berkembang hingga tahun 2016 dengan mengisi ruang yang kosong (intertisial), hingga membentuk pola kosentrik yang lebih penuh dan besar. Tahun 2016 luas lahan terbangunnya telah mencapai 46,38 % dari luas kota melebihi batas daya dukung lahan yang hanya 44, 86 % dari luas kota. Struktur ruang yang terbentuk mencerminkan Bukittinggi sebagai kota yang padat dan terpusat.

²⁷ Interpretasi jumlah penduduk yang diperbaharui adalah dari tulisan 'Asri (2001, p. 32), sumber utama yang digunakan sama, yakni dari (Hadjerat, 1950, pp. 5–6). Karena tidak berhati-hati dalam menginterpretasikan data sejarah, jumlah penduduk Bukittinggi dalam tulisan 'Asri menjadi salah.

²⁸ Penelitian sejarah sebelumnya hanya mencantumkan jumlah penduduk Bukittinggi dari tahun 1961-1980, atau data sebelum wilayah administrasi Bukittinggi menjadi tiga kecamatan ('Asri, 2001, p. 34)

Perubahan pola penggunaan lahan dan terbangun di Bukittinggi tidak lepas dari peningkatan jumlah penduduk, permintaan dan ketersediaan SDA, serta rencana pola ruang. Penggunaan lahan sawah yang tersisa pada tahun 2016 sebagian besar tersebar di Tigobaleh. Penggunaan lahan semak belukar/ ruang terbuka hijau terbesar berada di Mandiangin. Penggunaan lahan untuk kebun kopi menurun seiring permintaan pasar. Setelah tahun 1969 tidak terdapat lagi kebun kopi di Bukittinggi. Perdagangan menjadi sektor unggulan yang berimplikasi pada meningkatnya pertokoan/ luas lahan terbangun. Kearifan lokal dalam penggunaan lahan mulai banyak dilanggar akibat terbatasnya lahan.

Elemen ruang kota Bukittinggi tahun 2016 meliputi penggabungan elemen ruang masa prakolonial, masa kolonial Belanda dan Jepang, serta pascakolonial. Banyaknya peran dan elemen ruang pada masa lalu/ sejarah yang terjaga dengan baik, menjadikan Bukittinggi sebagai kota pusaka pada tahun 2012 (PU Cipta Karya, 2015).²⁹ Peranan Bukittinggi tahun 1945-2016 tidak banyak yang berubah seperti masa pendudukan Belanda. Bukittinggi masih menjadi kota terpenting kedua dan memberikan sumbangan PDRB terbesar kedua di Sumatra Barat setelah Padang. Dalam bidang pemerintahan, Bukittinggi pernah menjadi pusat pemerintahan skala provinsi dan nasional. Peran Bukittinggi di bidang pendidikan dan kesehatan terbatas dalam skala pelayanan regional, sedangkan di bidang perdagangan dan wisata peran Bukittinggi memiliki lingkup internasional.

Eksistensi Kota Bukittinggi sebagai kota tradisional yang terbentuk dari sebuah *pakan/ pasar* dapat dilihat dari perannya dalam skala dunia yang mampu berkompetisi menghadapi permintaan pasar sesuai potensi yang dimilikinya. Eksistensi Kota Bukittinggi ini tidak lepas dari berbagai faktor, 1) Faktor fisik, letaknya yang strategis di pusat pedalaman Minangkabau dan dilalui jalur perdagangan, 2) Faktor sumber daya alam (SDA), memiliki alam yang subur dan potensi wisata alam yang indah, 3) Faktor sumber daya manusia (SDM) yang terkenal gigih, berani, penuh perhitungan dalam mengambil keputusan.

²⁹ Kota pusaka adalah kota yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya (PU Cipta Karya, 2015)

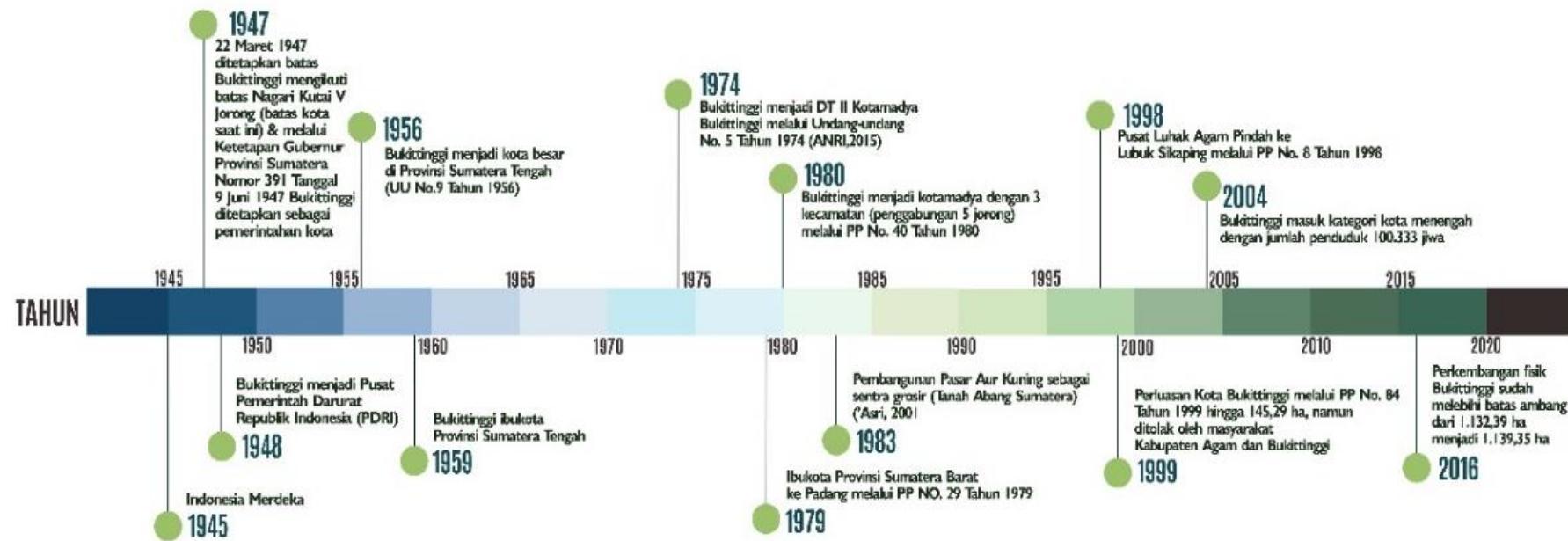
Selama tahun 1945-2016 terdapat beberapa *milestone* perkembangan Kota Bukittinggi (lihat gambar VII.25):

- Tahun 1945, Bukittinggi menjadi ibu kota Keresidenan Sumatra Barat
- Tahun 1947, Bukittinggi memiliki peran ganda sebagai ibu kota Provinsi Sumatra menggantikan Medan, ibu kota Keresidenan Sumatra Barat, ibu kota sub-Provinsi Sumatra Tengah, pusat pertahanan divisi banteng di Sumatra, dan tempat tinggalnya wakil Presiden Muh. Hatta. Tahun 1947 juga menjadi tahun penting dalam penentuan masalah wilayah Kota Bukittinggi.
- Tahun 1950, Bukittinggi menjadi ibu kota Provinsi Sumatra Tengah
- Tahun 1955, pendirian Fakultas Kedokteran serta Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam (FIPIA) di Bukittinggi. Fakultas ini pindah ke Padang tahun 1961 - 1962 dan bergabung kedalam UNAND, IKIP karena ketersediaan lahan.
- Tahun 1957, menjadi ibu kota Provinsi Sumatra Barat. Secara *de facto* ibu kota Provinsi Sumatra Barat pindah ke Padang pada tahun yang sama karena masalah ketersediaan tanah untuk pembangunan
- Tahun 1979, ibu kota Provinsi Sumatra Barat pindah secara *de jure* ke Padang
- Tahun 1980, perubahan wilayah administrasi Bukittinggi yang terdiri dari lima jorong menjadi tiga kecamatan berdasarkan PP No. 40 tahun 1980.
- Tahun 1983, pembangunan pasar Aur Kuning yang menjadikannya sebagai pusat grosir di Sumatra Tengah hingga Malaysia. Pada tahun ini juga keluar wacana pertama tentang perluasan Kota Bukittinggi
- Tahun 1998, pusat Kabupaten/Luhak Agam yang berada di Bukittinggi sejak masa prakolonial dipindahkan ke Lubuk Basung untuk mengatasi disparitas antar wilayah. Pemindahan ini mengakibatkan berkurangnya peran Bukittinggi dalam skala regional di bidang pemerintahan.
- Tahun 1999, keluarnya PP No. 84 tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi yang mencapai 145, 299 Km² dari 25,24 Km². Tahun ini sekaligus menjadi tahun penolakan perluasan kota.
- Tahun 2004, jumlah penduduk Bukittinggi mencapai 100.333 jiwa. Artinya pada tahun ini Bukittinggi masuk kategori kota menengah berdasarkan jumlah penduduk (100.000 – 500.000 jiwa).

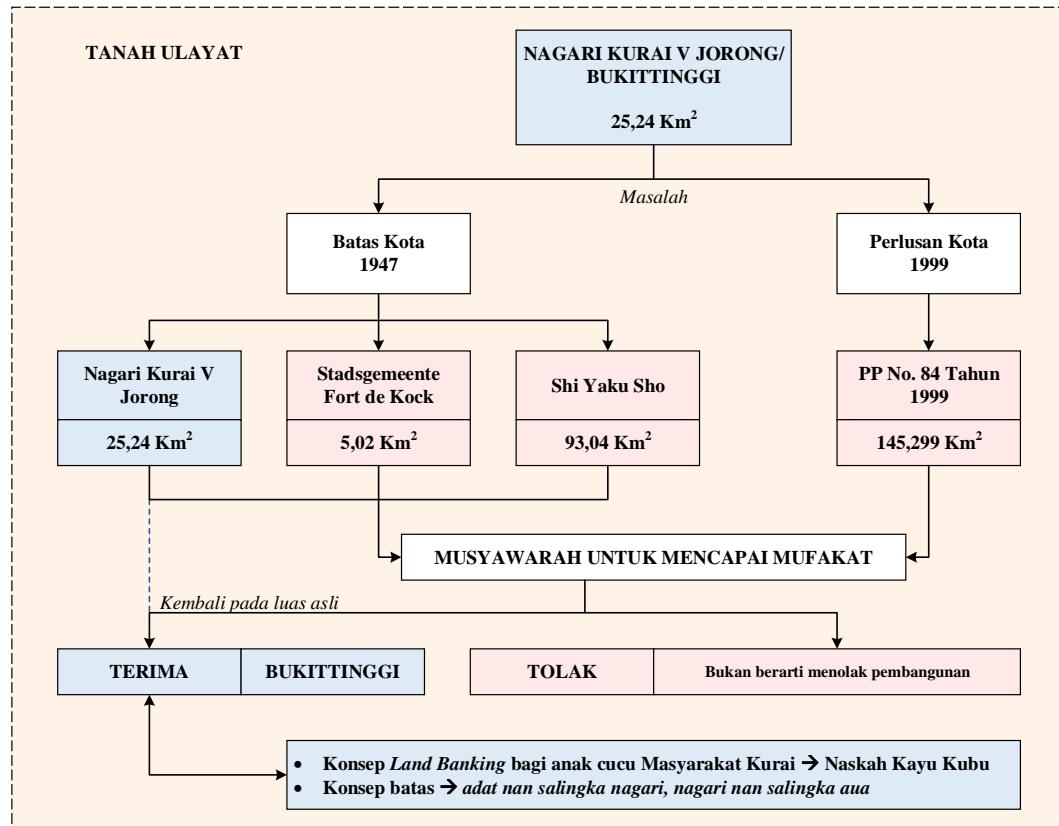
- Tahun 2016, Luas lahan terbangun di Bukittinggi telah mencapai 46,38 % dari total luas lahan atau 1.139, 35 ha, melebihi daya dukung lahannya yang hanya 44,86 % dari total luas lahan atau sekitar 1.132,39 ha.

Masalah perkembangan Kota Bukittinggi banyak diselesaikan dengan pendekatan budaya, terutama musyawarah dan mufakat yang sudah mengakar dalam masyarakat Minangkabau yang diwakili pemerintahan tradisional *tungku tigo sajarangan* dan *bundo kanduang*. Masalah batas wilayah selalu dikembalikan pada konsep batas *adat nan salingka nagari, nagari nan salingka aua*. Dalam kasus batas Kota Bukittinggi tahun 1947 dan perluasan kota tahun 1999, konsep *land banking* bagi masyarakat adat Kurai yang dituangkan dalam naskah Kayu Kubu, dan konsep batas nagari (*adat nan salingka nagari, nagari nan salingka aua*) menjadi dasar penyelesaian batas dan penolakan perluasan kota (lihat gambar VII.26). Gagalnya perluasan kota tahun 1999 juga dikarenakan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dari pemimpin tradisional masyarakat Kurai dan Agam tidak terjadi. Sementara pimpinan tradisional Minangkabau memiliki posisi yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan (*bargain position*). Suara mereka bisa menentukan berjalan atau tidaknya program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sulitnya pelepasan tanah ulayat diawal kemerdekaan hingga tahun 1960 dinilai sangat lumrah. Secara psikologis rasa memiliki seseorang akan tinggi setelah merasa kehilangan, seperti kasus tanah ulayat yang dirampas penjajah dan dikembalikan lagi oleh pemerintah kepada pemiliknya. Kesulitan ini juga dikarenakan kondisi keamanan Bukittinggi yang belum kondusif (adanya PRRI, PKI) yang berimbang pada kondisi ekonomi masyarakat .



Gambar VII.25 *Milestone* perkembangan Kota Bukittinggi pascakolonial tahun 1945-2016



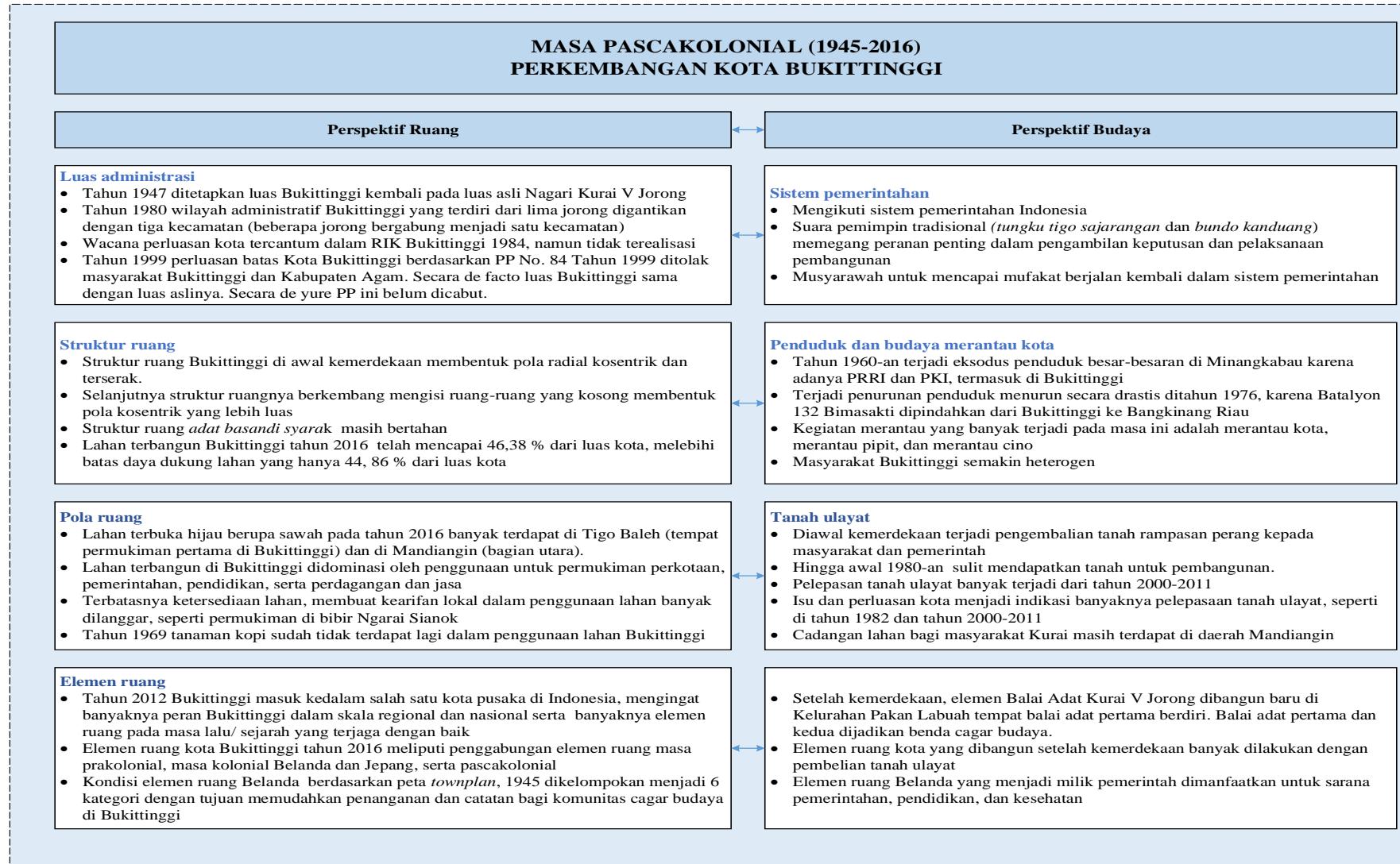
Gambar VII.26 Peranan budaya dalam menyelesaian batas perluasan Kota Bukittinggi tahun 1947 dan 1999

Seiring dengan waktu, pelepasan tanah ulayat mulai tinggi (terlihat dari data pembuatan sertifikat hak milik). Kebutuhan akan lahan, memudarkan budaya matrilineal (kontrol dari ninik mamak sebagai manager dalam tanah ulayat), dan kesadaran masyarakat akan pembangunan membuat tanah ulayat mulai dilepaskan. Pendekatan yang dilakukan pemerintah terhadap ninik mamak dan pemilik tanah ulayat sangatlah penting, termasuk komitmen dan kompensasi yang akan diterima masyarakat.

Merantau merupakan bentuk migrasi masyarakat Minangkabau, rantau kota merupakan bentuk urbanisasi masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung sejak masa prakolonial dan berlangsung hingga sekarang. Ketika pecahnya PRRI di Sumatra Barat, terjadi eksodus masyarakat Minangkabau secara besar-besaran. Faktor pemicunya adalah keamanan dan ekonomi. Eksodus ini dapat dikelompokan

ke dalam Merantau Cino karena sifatnya menetap, membawa serta keluarga, dan jarang pulang ke kampung halaman. Selanjutnya kegiatan merantau dipicu oleh faktor pendidikan (mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi/ baik) dan ekonomi (mendapatkan penghidupan yang lebih baik).

Bentuk pemerintahan di Bukittinggi setelah kemerdekaan mengikuti aturan dari pusat. Pemberian nama jorong pengganti kecamatan di Bukittinggi berlangsung hingga keluarnya PP No. 40 Tahun 1980. Sedangkan penggantian istilah nagari menjadi desa di Minangkabau berlangsung sejak keluarnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang desa. Peran pemerintah adat *tungku tigo sajarangan* dan *bundo kanduang* dalam pemerintah resmi masih dapat dirasakan hingga sekarang, terutama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Perpaduan unsur budaya dan ruang dalam perkembangan Kota Bukittinggi pada masa pascakolonial (1945-2016) dapat dilihat pada gambar VII.27.



Gambar VII.27 Keterkaitan perspektif ruang dan budaya dalam perkembangan Kota Bukittinggi pascakolonial (1945 - 2016)

Halaman ini sengaja dikosongkan agar bab selanjutnya berada pada halaman ganjil